BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 264 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 1Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Diskop-UKM adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Diskop-UKM yang selanjutnya disebut Renstra Diskop-UKM adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Diskop-UKM yang selanjutnya disebut Renja Diskop-UKM adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DISKOP-UKM

Pasal 2

Dokumen Renstra Diskop-UKM merupakan dokumen perencanaan strategis Diskop-UKM untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Diskop-UKM yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Diskop-UKM yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Diskop-UKM bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Diskop-UKM dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Diskop-UKM dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Diskop-UKM agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Diskop-UKM;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Diskop-UKM;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Diskop-UKM.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISKOP-UKM

Pasal 4

(1) Renstra Diskop-UKM Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Diskop-UKM dalam menyusun Renja Diskop-UKM.

(2) Renstra Diskop-UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Diskop-UKM paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Diskop-UKM; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Diskop-UKM.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Diskop-UKM Tahun 2025-2029;
   2. strategi Diskop-UKM dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Diskop-UKM dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Diskop-UKM; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Diskop-UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISKOP-UKM

Pasal 5

(1) Diskop-UKM melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Diskop-UKM dan evaluasi hasil Renstra Diskop-UKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Diskop-UKM terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Diskop-UKM.

(3) Kepala Diskop-UKM menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Diskop-UKM.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DISKOP-UKM

Pasal 6

Perubahan Renstra Diskop-UKM dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Diskop-UKM mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Diskop-UKM dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Diskop-UKM, maka Renstra Diskop-UKM dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Diskop-UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Diskop-UKM Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Diskop-UKM terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Diskop-UKM.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 264

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 264 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Koperasi dan UMKM terus menjadi fokus dalam rangka memperkuat perekonomian nasional dan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, penguatan koperasi dan UMKM diposisikan sebagai salah satu agenda prioritas untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Koperasi diarahkan untuk menjadi entitas usaha modern yang efisien dan berbadan hukum sehat, sementara UMKM didorong untuk naik kelas melalui transformasi digital, penguatan akses pembiayaan, dan peningkatan kualitas produk.

Di Kabupaten Bandung, sektor Koperasi dan UMKM telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung tahun 2024:

a. Terdapat 1.890 unit koperasi yang terdaftar, namun hanya sekitar 52,91% yang berstatus aktif;
b. Jumlah pelaku UMKM tercatat sebanyak 41.377 UMKM, dengan distribusi dominan pada sektor kuliner sebesar 57,22%;
c. Rasio kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sekitar 0,31% dari total PDRB Kabupaten Bandung tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan periode Renstra sebelumnya (2021 - 2026), terjadi peningkatan kuantitatif dalam jumlah pelaku usaha dan koperasi, namun kualitas kelembagaan, daya saing, dan akses terhadap pasar masih

menjadi tantangan utama. Banyak koperasi belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good cooperative governance*), dan sebagian besar UMKM belum terdigitalisasi atau belum memiliki akses pembiayaan formal.

Berbagai tantangan strategis juga perlu dicermati, di antaranya:

a. Kelembagaan koperasi yang belum efisien dan profesional, ditunjukkan oleh rendahnya jumlah koperasi aktif;
b. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM dalam proses produksi, pemasaran, dan manajemen usaha;
c. Sinergi antar *stakeholders* dalam membina koperasi dan UMKM, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga keuangan;
d. Belum optimalnya peran koperasi dalam membangun ekonomi lokal, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, sekaligus dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka diperlukan upaya sistematis dan terarah untuk memperkuat kembali peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan. Inpres tersebut menekankan pentingnya pembentukan koperasi yang profesional dan berbasis kebutuhan lokal, yang didukung oleh pemerintah daerah secara aktif melalui perencanaan, fasilitasi kelembagaan, dan intervensi kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat.

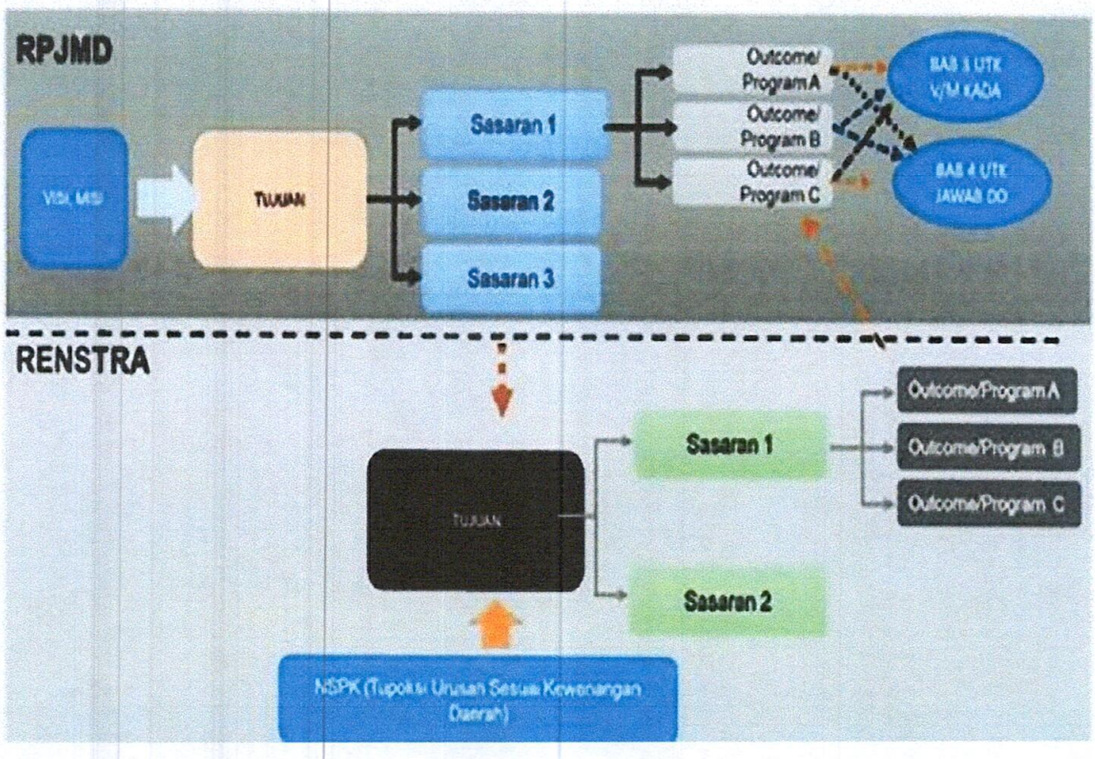
Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah juga memberikan arah penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan selaras dengan RPJMN 2025–2029. Inmendagri ini menekankan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra harus berbasis pada data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Hal ini menjadi acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung agar seluruh strategi, sasaran, dan program yang dirumuskan tidak hanya menjawab isu lokal, tetapi juga sejalan dengan prioritas nasional, terutama dalam mendorong transformasi kelembagaan koperasi dan akselerasi digitalisasi UMKM.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional, tantangan aktual pembangunan daerah, serta instrumen kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 menjadi sangat penting. Dokumen ini merupakan acuan strategis bagi perangkat daerah dalam menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Renstra ini juga menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025–2029.

Adapun keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2, 2025

Lebih dari sekadar dokumen administratif, Renstra ini diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang dapat mendorong terwujudnya ekosistem koperasi dan UMKM yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kelembagaan koperasi, perluasan akses pasar dan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Renstra ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan kolaborasi multipihak, termasuk antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan komunitas lokal, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam mengukur kinerja

perangkat daerah dan sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap pemanfaatan sumber daya pembangunan di sektor ekonomi rakyat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029, mengacu pada :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
g. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;

j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
k. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
l. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
q. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

s. Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
w. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
x. Peraturan Bupati No 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, sasaran, dan program pembangunan sektor Koperasi dan UMKM secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan. Selain itu, Renstra ini juga dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan sektoral di bidang koperasi dan UMKM, dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang operasional dan terukur;
b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
c. Memberikan kerangka acuan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan sektor koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung dalam membangun sinergi lintas sektor dan lintas wilayah;
d. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sektor koperasi dan UKM, melalui penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas dan dapat diukur setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, kinerja pelayanan perangkat daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dan dinilai perlu diatasi melalui Rancangan Awal Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Di bab ini menjelaskan pula tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu Strategis.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif. Dikemukakan juga indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

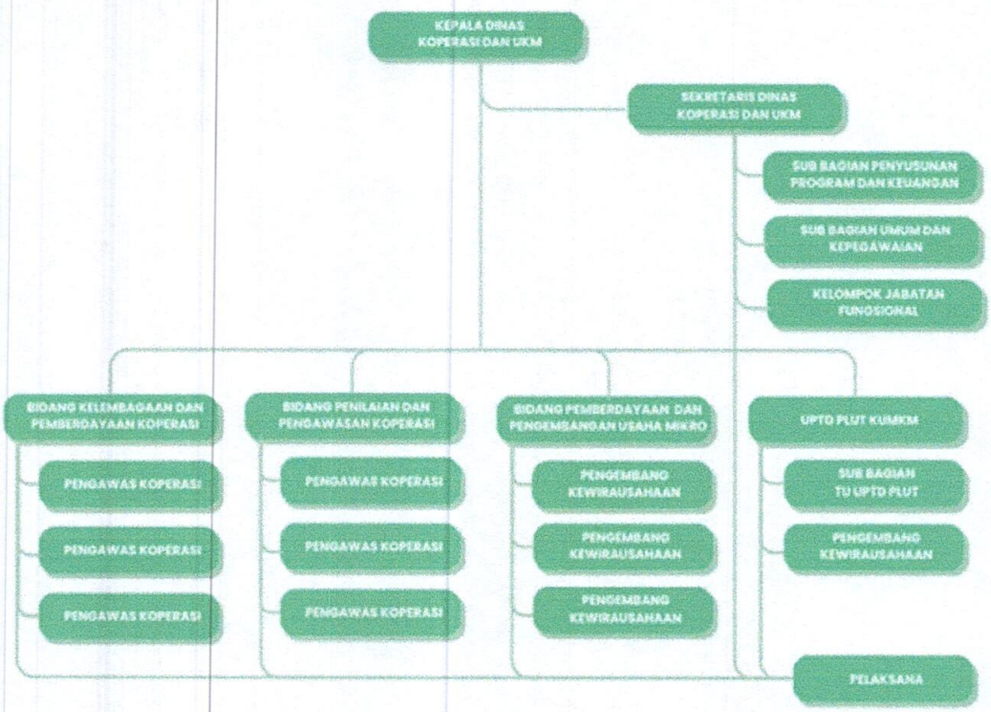
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa Diskop-UKM merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain:

1) perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
2) pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan;
4) pengelolaan administrasi dinas secara menyeluruh dan akuntabel; serta
5) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Diskop-UKM Kab. Bandung



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Fungsi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah :

a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan

program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengolahan keuangan. Sekretaris membawahkan :

a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi. Kepala Bidang membawahkan:

a) JFT Pengawas Koperasi
b) Pelaksana

4) Bidang Penilaian dan Pengawasan Koperasi

Bidang Penilaian dan Pengawasan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Penilaian dan Pengawasan Koperasi, Kepala Bidang membawahkan:

a) JFT Pengawas Koperasi
b) Pelaksana

5) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kepala Bidang membawahkan :

a) JFT Pengembang Kewirausahaan
b) Pelaksana

6) UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM

UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpim oleh seorang kepala, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Diskop-UKM, Kepala UPTD membawahkan:

a) Sub Bagian Tata Usaha
b) JFT Pengembang Kewirausahaan
c) Pelaksana

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM telah menyusun kajian Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dari hasil kajian tersebut, dapat disampaikan bahwa peningkatan beban kerja pada dinas sebagai akibat dari prioritas pembangunan koperasi dan UMKM oleh pemerintah pusat menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi. Restrukturisasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa dinas dapat berfungsi dengan lebih efisien dan efektif dalam menangani tugas tambahan. Penambahan unit atau bidang yang fokus pada koperasi dan UMKM, misalnya, dapat membantu mengalokasikan sumber daya dan perhatian yang lebih besar pada program-program ini. Dengan struktur organisasi yang lebih terfokus, setiap bagian dalam dinas dapat memiliki tanggung jawab yang jelas dan spesifik, sehingga mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan kinerja keseluruhan.

Implementasi pemetaan perangkat daerah saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berbeda dengan pemetaan sebelumnya, pemetaan perangkat daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan atas perhitungan faktor umum dan faktor substantif. Faktor umum terdiri atas luas daerah, jumlah penduduk, besaran APBD, sedangkan faktor teknis terdiri atas hal-hal substantif yang menunjukkan 'core' tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang bersangkutan. Kelembagaan pemda yang dibentuk seharusnya dapat melaksanakan beban kerja yang menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan. Dengan hal tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung perlu dilakukan pembobotan dan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan tipologi dinas.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data per Agustus 2025, jumlah pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, terdiri dari 29 orang PNS dan 7 orang PPPK. Jumlah pegawai yang ada dibanding jumlah kebutuhan pegawai atau jumlah ideal pegawai sesuai beban kerja disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Diskop-UKM

Kelas Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Pegawai yang ada		Selisih Kebutuhan Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
Eselon II	1	1	0	0
Eselon III	4	3	1	0
Eselon IV	4	1	3	0
JFT Pengawas Koperasi	16	2	5	-9
JFT Pengembang Kewirausahaan	7	1	2	-4
Pelaksana	41	10	6	-25
JFT Perencana	2	0	0	-2
JFT Analis Sumber Daya Manusia	4	0	0	-4
JFT Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0	0
JFT Pranata Perizinan Ahli Pertama	1	0	0	-1
Arsiparis Terampil Muda	1	0	0	-1
Arsiparis Terampil Pertama	1	0	0	-1
Arsiparis Terampil	2	0	0	-2
Jumlah	85	19	17	-49

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, jumlah ideal pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung adalah 85 orang dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 36 orang (19 Laki-laki dan 17 Perempuan), jadi masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 49 orang.

Sedangkan untuk Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dimiliki meliputi gedung/bangunan, ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada rincian dari masing-masing tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Diskop-UKM

No	Uraian	Saldo Akhir Per 31 Des 2024	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2024	Nilai Buku Per 31 Des 2024
1	Tanah	9.056.070.854,00		9.056.070.854,00
2	Peralatan dan Mesin	6.965.859.938,00	5.014.469.031,00	1.951.390.907,00
3	Gedung dan Bangunan	9.748.645.685,00	801.465.405,00	8.947.180.280,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	195.752.000,00	35.887.867,00	159.864.133,00
5	Aset Tetap Lainnya	27.646.000,00	-	27.646.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Total Aset Tetap	25.993.974,00	5.851.822.303,00	20.142.152.174,00
7	Aset Tak Berwujud	-	-	-
8	Aset Lain-lain/ Rusak Berat	3.000.000,00	3.000.000,00	-
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	-	-	-
Total Aset Lainnya		3.000.000,00	3.000.000,00	-
Total Aset Tetap + Aset Lainnya		25.996.974.477,00	5.854.822.303,00	20.142.152.174,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

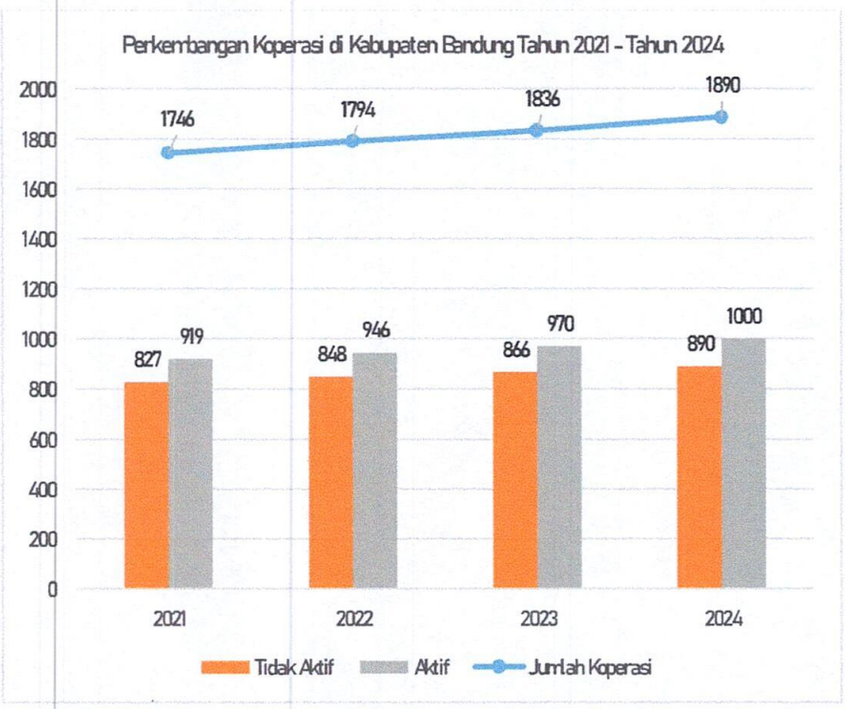
Selama periode pelaksanaan Renstra Tahun 2021 - 2026, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pelayanan publik dalam rangka mendukung penguatan koperasi serta pemberdayaan pelaku UMKM. Pelaksanaan pelayanan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah secara

berkelanjutan. Capaian kinerja pelayanan Dinas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1) Perkembangan Koperasi

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada grafik dan gambar peta sebaran sebagai berikut :

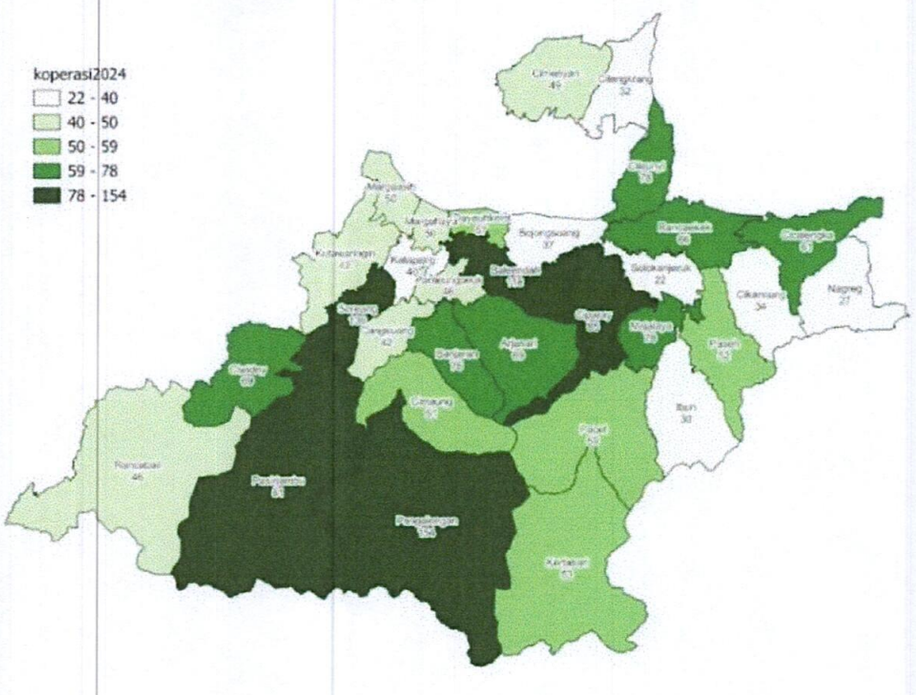
Gambar 2.2 Perkembangan jumlah Koperasi Tahun 2021–2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Pada grafik Perkembangan jumlah Koperasi diatas, garis biru menunjukkan tren peningkatan jumlah total koperasi dari tahun 2021 (1746) hingga 2024 (1890). Jumlah koperasi aktif menunjukkan kenaikan dari 2021 (919) ke 2022 (946), kenaikan di 2023 (970), kemudian kenaikan lagi di 2024 (1.000). Secara keseluruhan, ada peningkatan jumlah koperasi aktif dari awal hingga akhir periode. Di setiap tahun, jumlah koperasi aktif selalu lebih banyak daripada jumlah koperasi yang tidak aktif. Ini adalah indikasi positif bahwa sebagian besar koperasi di Kabupaten Bandung berfungsi sebagaimana mestinya.

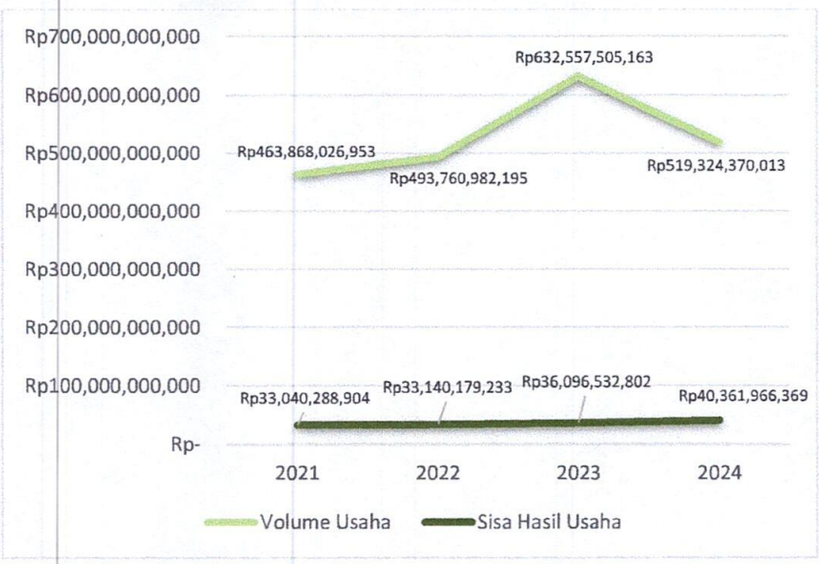
Gambar 2.3 Peta Sebaran Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Pada peta sebaran koperasi diatas, Kecamatan dengan jumlah koperasi terbanyak (rentang 78-154, warna hijau tua) terkonsentrasi di bagian selatan Kabupaten Bandung, terutama di Pangalengan dan Soreang. Baleendah juga termasuk dalam kategori ini. Wilayah dengan jumlah koperasi sedang (rentang 59-78, warna hijau agak tua) tersebar di beberapa titik, termasuk Ciparay, Banjaran, dan Pacet. Sebagian besar wilayah di bagian utara dan timur menunjukkan jumlah koperasi yang lebih sedikit (rentang 22-59, warna hijau muda hingga sedang). Beberapa kecamatan dengan jumlah koperasi paling sedikit (22-40, hijau sangat muda) antara lain Cimenyan, Cilengkrang, Nagreg, dan Ibun.

Gambar 2.4 Perkembangan Volume Usaha dan SHU Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021–2024

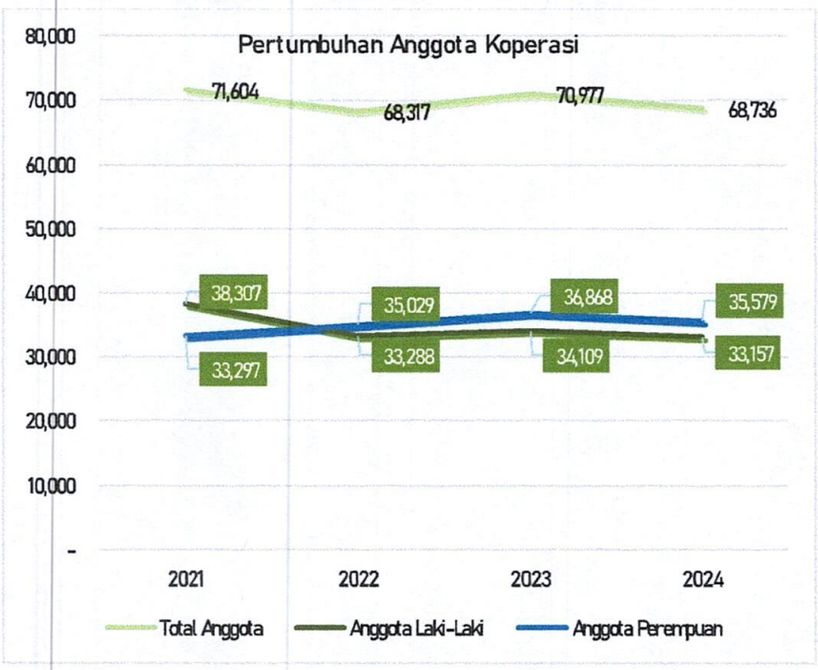


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Selama periode 2021 hingga 2024, dinamika kinerja usaha koperasi di Kabupaten Bandung menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan respons koperasi terhadap dinamika ekonomi. Volume Usaha koperasi menunjukkan tren naik pada dua tahun awal, yakni dari Rp463,87 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp493,76 miliar di tahun 2022 (naik 6,4%), dan mencapai puncaknya di tahun 2023 sebesar Rp632,56 miliar (lonjakan 28,1%). Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 17,9% menjadi Rp519,32 miliar.

Berbeda dengan fluktuasi Volume Usaha, tren Sisa Hasil Usaha (SHU) cenderung meningkat secara konsisten setiap tahun, dari Rp33,04 miliar (2021) menjadi Rp40,36 miliar (2024), atau tumbuh rata-rata 6,9% per tahun. Peningkatan SHU meskipun Volume Usaha menurun pada 2024 menjadi indikator membaiknya efisiensi manajerial dan tata kelola koperasi, termasuk kemungkinan adanya efisiensi biaya atau penguatan lini usaha yang memberikan margin lebih tinggi.

Gambar 2.5 Pertumbuhan Anggota Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021–2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Selama periode tahun 2021 hingga 2024, jumlah anggota koperasi di Kabupaten Bandung menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah total anggota koperasi tercatat sebanyak 71.604 orang. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 68.317 orang, kemudian naik kembali pada tahun 2023 menjadi 70.977 orang, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 68.736 orang. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi keanggotaan koperasi secara berkelanjutan.

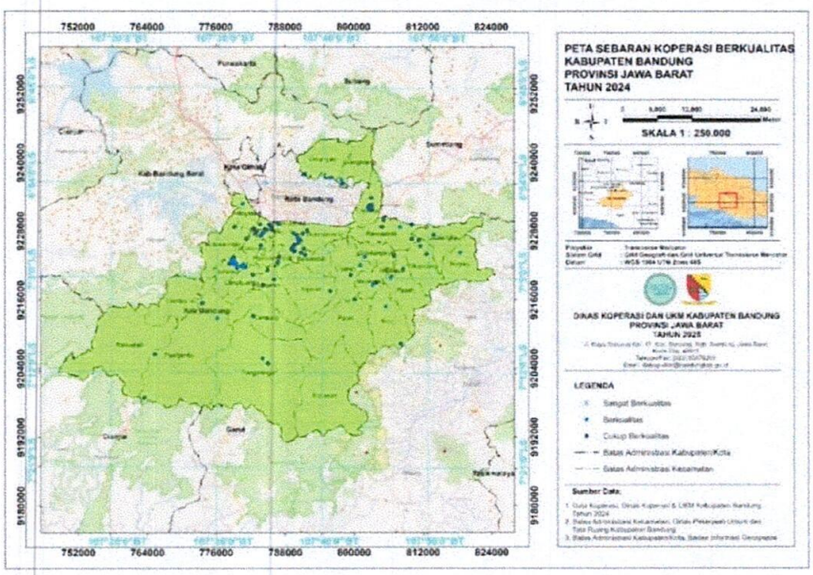
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, anggota laki-laki masih mendominasi jumlah keanggotaan koperasi, meskipun tren keanggotaannya mengalami penurunan secara bertahap dari 38.307 orang pada tahun 2021 menjadi 35.579 orang pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah anggota perempuan menunjukkan kecenderungan yang lebih stabil dan bahkan mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, dari 33.297 orang pada tahun 2021 menjadi 34.109 orang pada

tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 33.157 orang di tahun 2024.

Data ini menunjukkan bahwa walaupun secara total jumlah anggota koperasi belum mengalami pertumbuhan yang konsisten, partisipasi perempuan dalam koperasi terus menunjukkan potensi positif. Hal ini menjadi sinyal penting bagi arah kebijakan pemberdayaan koperasi ke depan, terutama dalam mendorong inklusivitas dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi berbasis koperasi.

Secara umum, dinamika pertumbuhan keanggotaan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih adaptif dan partisipatif untuk memperluas basis anggota koperasi, memperkuat peran gender dalam koperasi, serta membangun model koperasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha mikro.

Gambar 2.6 Peta Sebaran Koperasi Berkualitas di Kabupaten Bandung Tahun 2024

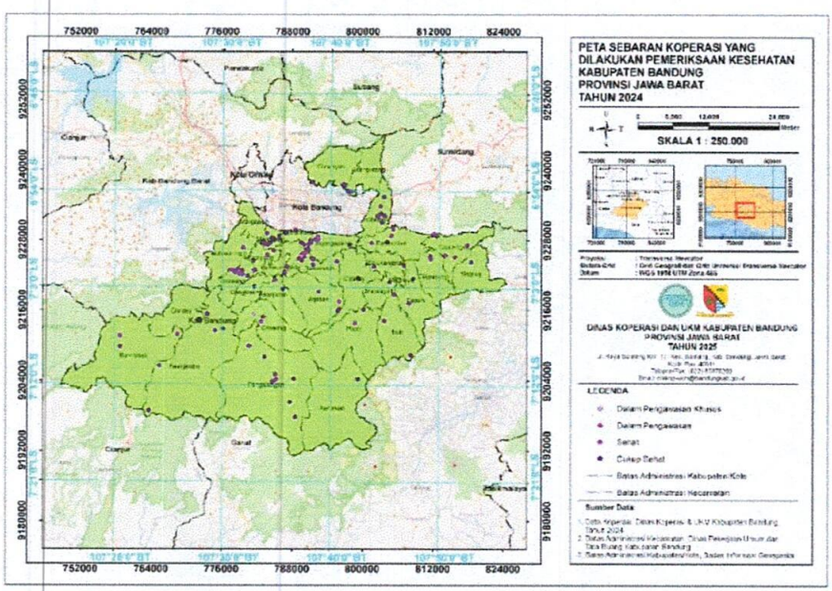


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Koperasi berkualitas tahun 2024 berjumlah 92 koperasi, Kategori jumlah koperasi paling banyak, yaitu koperasi cukup berkualitas dengan 72 koperasi. Dan koperasi sangat berkualitas paling sedikit jumlahnya, yaitu 2 koperasi. Koperasi berkualitas berjumlah 18 koperasi.

Pada peta pun terlihat bagaimana pola persebarannya. Titik-titik koperasi yang terlihat mengelompok berada di wilayah Kecamatan Cileunyi, Baleendah, Dayeuhkolot, Margahayu, Margaasih dan Soreang. Sebaran lokasi koperasi berkualitas memusat di sekitar daerah (bagian Utara) pemerintahan kabupaten dan Kota Bandung sedangkan wilayah bagian Selatan sangat sedikit dan atau bahkan tidak ada seperti pada Rancabali & Kertasari. Hal ini menunjukkan belum meratanya ketersediaan koperasi yang berkualitas.

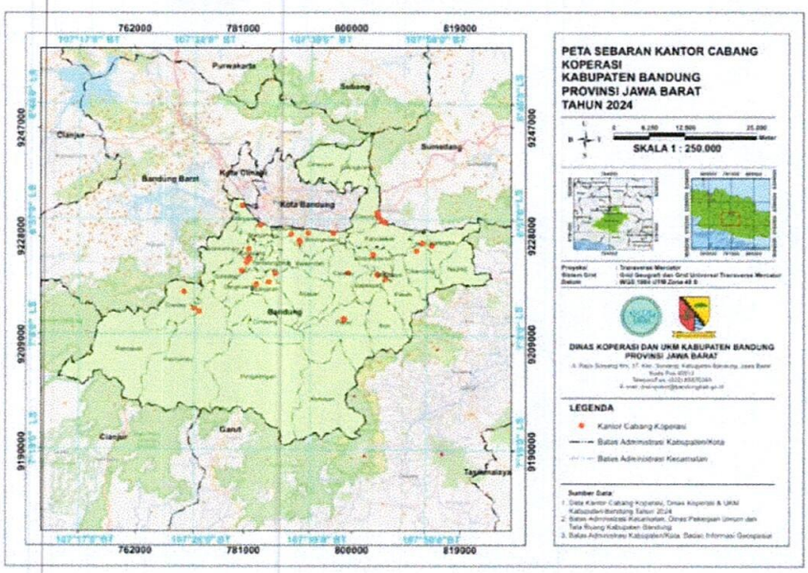
Gambar 2.7 Peta Sebaran Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan di Kabupaten Bandung Tahun 2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Koperasi yang dilakukan pemeriksaan tahun 2024 berjumlah 115 koperasi, Koperasi dengan kategori dalam pengawasan khusus memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 2. Dalam pengawasan berjumlah 19, sehat berjumlah 35, dan cukup sehat berjumlah 59. Pada peta yang dilakukan pemeriksaan kesehatan penyebaran koperasi lebih padat di bagian Utara daerah pemerintahan kabupaten dan Kota Bandung sama halnya dengan koperasi berkualitas. Wilayah di Selatan cenderung sedikit jumlah koperasinya.

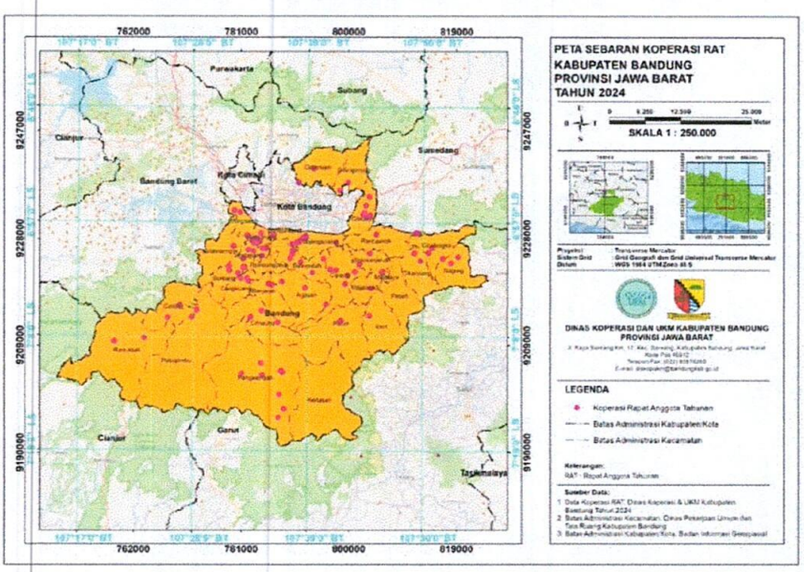
Gambar 2.8 Peta Sebaran Kantor Cabang Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Koperasi kantor cabang berjumlah 30, Kecamatan Katapang memiliki jumlah koperasi kantor cabang terbanyak, yaitu sebanyak 6 koperasi, disusul oleh Kecamatan Bojongsoang dengan 4 koperasi kantor cabang. Lokasi kantor cabang koperasi lebih tersebar di wilayah Utara yang dekat pusat pemerintahan dan perekonomian. Sedangkan wilayah tengah hingga Selatan belum ada kantor cabang koperasi yang berdiri di daerah tersebut.

Gambar 2.9 Peta Sebaran Koperasi yang melaksanakan RAT di Kabupaten Bandung Tahun 2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Koperasi yang melakukan rapat anggota tahunan berjumlah 254, Kecamatan Margahayu memiliki jumlah koperasi RAT terbanyak, yaitu sebanyak 11 koperasi, disusul oleh Kecamatan Baleendah dengan 9 koperasi RAT. Hampir semua kecamatan memiliki koperasi RAT kecuali Paseh dan Kertasari, maka dari itu melalui peta ini dijadikan acuan oleh pihak terkait untuk melakukan pembinaan terhadap Kecamatan Paseh & Kertasari agar memiliki koperasi RAT.

2) Perkembangan UMKM

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Bandung sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM juga menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi nasional.

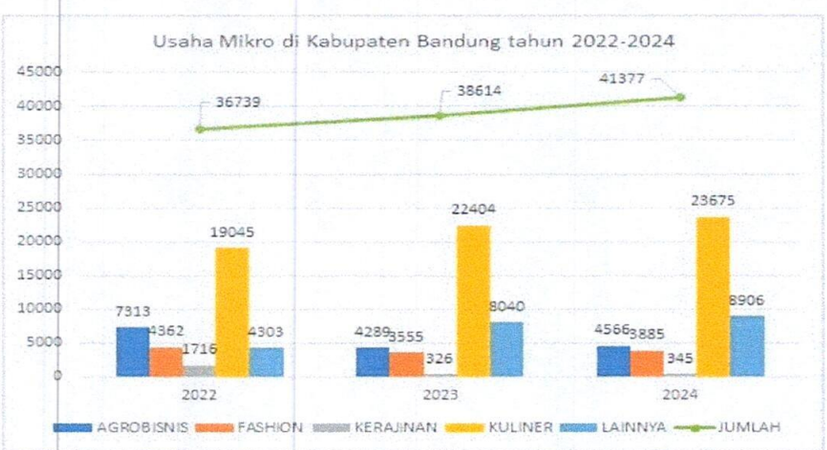
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan UMKM di Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha, diversifikasi produk, serta meluasnya akses ke pasar, baik lokal, maupun nasional. Sektor-sektor unggulan seperti industri kreatif, makanan dan minuman olahan, kerajinan tangan, serta fashion berbasis budaya lokal menjadi andalan yang terus berkembang dan berinovasi. Dukungan Pemerintah Daerah melalui program pemberdayaan, fasilitasi perizinan, pelatihan kewirausahaan, hingga akses pembiayaan turut mendorong daya saing UMKM di Kabupaten Bandung. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku industri, semakin memperkuat ekosistem UMKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi.

Namun demikian, tantangan dalam hal kualitas produk, manajemen usaha, dan keterbatasan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi secara

berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya strategis dalam peningkatan kapasitas dan pendampingan UMKM menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Bandung tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada grafik dan gambar peta sebaran sebagai berikut :

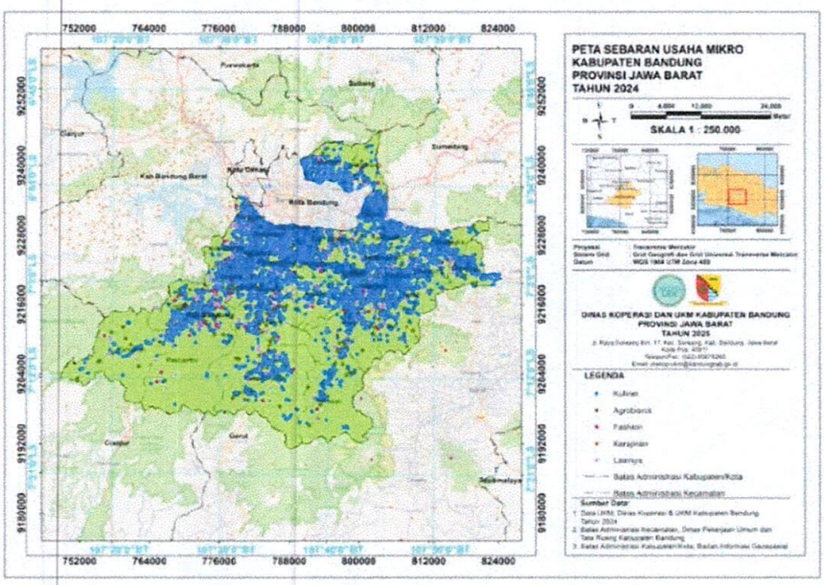
Gambar 2.10 Perkembangan jumlah Usaha Mikro Tahun 2022–2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Berdasarkan grafik perkembangan usaha mikro tahun 2022 - 2024, garis hijau menunjukkan tren peningkatan jumlah total usaha mikro dari tahun 2022 (36.739) ke 2024 (41.377). Ini menunjukkan pertumbuhan positif dalam jumlah total usaha mikro di Kabupaten Bandung. Jenis usaha Kuliner dan Fashion merupakan 2 kategori yang secara konsisten menunjukkan jumlah usaha yang paling tinggi dibandingkan kategori lainnya di setiap tahun. Ini menandakan bahwa sektor Kuliner dan Fashion merupakan kontributor utama dalam ekosistem usaha mikro di Kabupaten Bandung. Jenis usaha Agrobisnis dan Kerajinan juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2024.

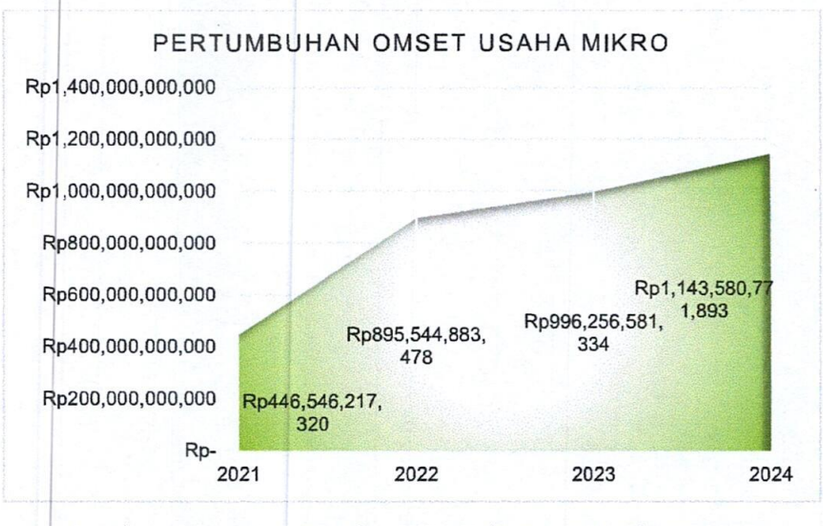
Gambar 2.11 Peta Sebaran UMKM di Kabupaten Bandung Tahun 2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Pada peta sebaran usaha mikro diatas, Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Bandung sebanyak 41377 Usaha dengan Sebaran Wilayah padat usaha mikro berada di wilayah Utara & Timur Kabupaten Bandung sebab yang dapat kita ketahui bahwa di wilayah tersebut penduduk padat, banyak pemukiman, dekat dengan akses pemerintahan, dan jalan utama antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Hal tersebut memiliki kelebihan bagi para pelaku usaha mikro karena berada di letak yang lebih strategis dibandingkan wilayah Selatan, namun juga memiliki kekurangan karena persaingannya ketat apabila memiliki satu usaha mikro yang sama jenisnya. Wilayah sedikit usaha mikro berada di wilayah Selatan yang kemungkinan faktor penyebabnya adalah sedikitnya penduduk, topografi/berupa pegunungan, aksesibilitas sulit dijangkau oleh masyarakat.

Gambar 2.12 Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Tahun 2021–2024



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Selama periode tahun 2021 hingga 2024, kinerja usaha mikro di Kabupaten Bandung menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dan konsisten. Pada tahun 2021, total omset usaha mikro tercatat sebesar Rp446,55 miliar, kemudian mengalami lonjakan tajam pada tahun 2022 menjadi Rp895,54 miliar, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dalam satu tahun. Kenaikan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan nilai omset mencapai Rp996,26 miliar pada tahun 2023 dan menembus angka Rp1,14 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan positif ini mencerminkan geliat ekonomi mikro yang kuat, serta keberhasilan intervensi kebijakan dan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dari sisi akses permodalan, pelatihan, maupun pendampingan usaha.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Selama periode perencanaan sebelumnya, berbagai capaian kinerja pelayanan telah berhasil diraih, meskipun masih

dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan perbaikan ke depan.

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM ditunjukkan melalui peningkatan jumlah koperasi aktif dan sehat, bertambahnya pelaku UMKM yang memperoleh fasilitasi perizinan berusaha, serta meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam program pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan. Dalam aspek pemberdayaan, Dinas Koperasi dan UKM berhasil memfasilitasi penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha melalui program pelatihan manajemen usaha kewirausahaan, dan pengembangan produk. Di sisi pembiayaan, berbagai program kemitraan dengan lembaga keuangan dan penyaluran bantuan permodalan telah mendukung akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskop UKM

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Data Awal	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Laju pertumbuhan usaha mikro	12.44%	106.92%	4.01%	4.64%	106.92%	5.10%	7.16%	100.00%	127.12%	154.05%
2	Persentase koperasi sehat	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	32.86%	35.92%	37.40%	164.29%	179.59%	187.01%
3	persentase Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	3.11%	3.19%	6.42%	7.63%	3.19%	6.03%	7.06%	100.00%	0.939888	92.55%
4	persentase usaha mikro yang meningkat kualitasnya	7.97%	8.05%	3.81%	4.02%	8.05%	8.03%	3.36%	100.00%	2.106453	83.57%
5	Persentase Koperasi Patuh	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	28.57%	28.57%	37.40%	142.86%	142.86%	187.01%
6	Persentase Koperasi sehat	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	32.86%	35.92%	37.40%	164.29%	179.59%	187.01%
7	Persentase Koperasi Aktif	52.63%	43.59%	43.69%	43.79%	52.73%	52.83%	52.91%	120.97%	120.93%	120.84%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.22	82.89	83.56	84.23	83.75	85.89	86.34	101.04%	102.79%	102.51%
9	Nilai AKIP	75.87	78.35	79	80	78.36	81.10	84.50	100.01%	102.66%	105.63%
10	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	93.71%	94.82%	95.32%	95.82%	96.98%	95.00%	99.92%	102.28%	99.66%	104.28%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Evaluasi atas capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan dan pencapaian kinerja yang signifikan pada sebagian besar indikator utama. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pemerataan dan keberlanjutan kualitas pelayanan publik. Sejumlah indikator menunjukkan kinerja di atas target, bahkan melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026, antara lain :

1) Laju Pertumbuhan Usaha Mikro mencapai hingga 154,05% pada tahun 2024;
2) Persentase Koperasi Sehat dan Koperasi Patuh menunjukkan konsistensi kinerja di atas 170%, yang mengindikasikan efektivitas dalam penguatan tata kelola koperasi;
3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai AKIP, dan Persentase Aset Dalam Kondisi Baik stabil dan meningkat setiap tahun, menandakan kinerja organisasi internal yang baik dan pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelayanan ini antara lain :

1) Konsistensi pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan koperasi dan UMKM;
2) Peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku koperasi terhadap regulasi dan manajemen kelembagaan;
3) Komitmen DISKOP-UKM terhadap peningkatan akuntabilitas dan kepuasan publik.

Meskipun mayoritas indikator menunjukkan hasil positif, terdapat indikator yang belum memenuhi target, bahkan menunjukkan tren menurun :

1) Persentase Jumlah Wirausaha Baru yang Tumbuh mengalami penurunan capaian dari 100% (2022) menjadi hanya 92,55% (2024);

2) Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Kualitasnya menunjukkan fluktuasi tajam, dari 210,65% (2023) turun menjadi hanya 83,57% (2024);
3) Persentase Koperasi Aktif, meskipun berada di atas target, relatif stagnan dalam kisaran 120%, tanpa peningkatan signifikan.

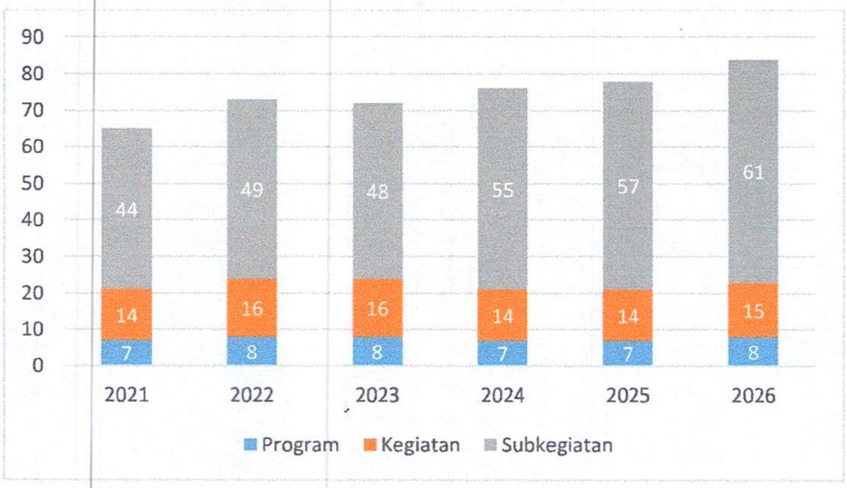
Faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target ini antara lain:

1) Belum optimalnya kolaborasi antar-sektor dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas usaha mikro;
2) Terjadinya pemutakhiran sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung perlu dievaluasi sebagai bahan umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Adanya evaluasi terhadap kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan diharapkan dapat memberikan masukan untuk merumuskan kembali program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya.

Gambar 2.13 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Renstra Diskop-UKM



Sumber: Hasil Evaluasi Diskop-UKM, 2024

Tabel 2.4 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja pada Renstra Diskop UKM 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kapasitas Usaha Mikro	3.11%	7.59	%	3.19	%	6.42	%	7.63	%	7.07	%	7.59	%	3.19	%	6.03	%	7.06	%	-	%	-	%	100.00 %	93.93 %	92.55 %	0,00 %	0,00 %	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan*	*2.49%*	*7.59*	*%*	*3.19*	*%*	*6.42*	*%*	*7.63*	*%*	*7.07*	*%*	*7.59*	*%*	*3.19*	*%*	*6.03*	*%*	*7.06*	*%*	-	%	-	%	*100.00 %*	*93.93 %*	*92.55 %*	*0,00 %*	*0,00 %*	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata potensi dan pengembangannya	4 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	100.00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	(N/A)	2610	Unit Usaha	N/A		2610	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	N/A		3452	Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	0,00%	132.26%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	154 Unit Usaha	960	Unit Usaha	260	Unit Usaha	120	Unit Usaha	380	Unit Usaha	100	Unit Usaha	100	Unit Usaha	300	Unit Usaha	120	Unit Usaha	292	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	115.38 %	100.00%	76.84 %	0,00 %	0,00 %	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Kemitraan Usaha Mikro																											
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	950	Unit Usaha	300	Unit Usaha	300	Unit Usaha	150	Unit Usaha	100	Unit Usaha	100	Unit Usaha	361	Unit Usaha	300	Unit Usaha	150	Unit Usaha	-	Unit Usaha	0	Unit Usaha	120.33 %	100.00%	100.00%	0,00 %	0.00 %
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	9230	Unit Usaha	300	Unit Usaha	2530	Unit Usaha	6000	Unit Usaha	200	Unit Usaha	200	Unit Usaha	1047	Unit Usaha	775	Unit Usaha	775	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	349.00 %	30.63 %	12.92 %	0.00 %	0.00 %
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	(N/A)	220	Orang	80	Orang	50	Orang	30	Orang	30	Orang	30	Orang	137	Orang	100	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	171.25 %	200.00%	0,00 %	0.00 %	0.00 %
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberda	3 Kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	4	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	100.00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	yaan bagi UMKM																														
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1312 Orang	1705	Orang	N/A		1705	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	N/A		1705	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00%	100.00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	(N/A)	200	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		150	Unit Usaha	25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		50	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00%	33.33%	0.00%	0.00%		
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	(N/A)	60	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		20	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00%	100.00%	0.00%	0.00%		
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	(N/A)	200	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		150	Unit Usaha	25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		200	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00%	133.33%	0.00%	0.00%		
Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	(N/A)	150	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	(N/A)	150	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		100	Unit Usaha	25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		91	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00%	91.00%	0.00%	0.00%		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	(N/A)	150	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	(N/A)	180	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		100	Unit Usaha	40	Unit Usaha	40	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	(N/A)	16500	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		7000	Unit Usaha	7000	Unit Usaha	2500	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		993	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	14.19 %	0.00 %	0.00 %		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	(N/A)	910	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		700	Unit Usaha	105	Unit Usaha	105	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		546	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	78.00 %	0.00 %	0.00 %		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kualitas Usaha Mikro	7.97%	5.65	%	8.05	%	3.81	%	4.02	%	5.26	%	5.65	%	8.05	%	8.03	%	3.36	%	0.00	%	0	%	100.00 %	210.76%	83.57 %	0.00 %	0.00 %		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan Usaha*	*7.97%*	*5.65*	%	*8.05*	%	*3.81*	%	*4.02*	%	*5.26*	%	*5.65*	%	*8.05*	%	*8.03*	%	3.36	%	*0.00*	%	*0*	%	*100.00 %*	*210.76%*	*83.57 %*	*0.00 %*	*0.00 %*		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1592 Unit Usaha	4531	Unit Usaha	2938	Unit Usaha	1593	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	409	Unit Usaha	1591	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	13.92 %	99.87 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	(N/A)	1500	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		1500	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	0.00 %	0,00 %	0,00 %
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	(N/A)	4	Lembaga	(N/A)		(N/A)		4	Lembaga	4	Lembaga	4	Lembaga	(N/A)		(N/A)		1	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0,00%	0,00 %	25.00 %	0.00 %	0.00 %
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	(N/A)	160	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		80	Unit Usaha	40	Unit Usaha	40	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		80	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	100.00%	0.00 %	0.00 %
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	(N/A)	500	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		200	Unit Usaha	150	Unit Usaha	150	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		1367	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	683.50%	0.00 %	0.00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Manusia, Serta Desain dan Teknologi																												
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Patuh	20%	28.99	%	20	%	20	%	20	%	28.52	%	28.99	%	28.57	%	28.57	%	37.40	%	0	%	0	%	142.85 %	142.85%	187.01%	0.00 %	0.00 %
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/ Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi*	*20%*	*28.99*	%	*20*	%	*20*	%	*20*	%	*28.52*	%	*28.99*	%	*28.57*	%	*48.98*	%	*66.93*	%	*0*	%	*0*	%	*142.85 %*	*244.90%*	*334.65%*	*0.00 %*	*0.00 %*
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	201 Unit Usaha	120	Unit Usaha	60	Unit Usaha	60	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	60	Unit Usaha	110	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	100.00 %	183.33%	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Pemeriksaan Kepatuhan	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Unit Usaha	60	Unit Usaha	(N/A)		60	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	(N/A)		110	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	183.33%	0,00%	0,00%	0,00%		
Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai kepatuhannya	233 Koperasi	60	Koperasi	60	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	160	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	266.67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi	3 Koperasi	3	Koperasi	3	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	3	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	0	Koperasi	100.00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	(N/A)	180	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		60	Unit Usaha	60	Unit Usaha	60	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		134	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00%	223.33%	0.00%	0.00%		
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	(N/A)	180	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		60	Unit Usaha	60	Unit Usaha	60	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		186	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00%	310.00%	0.00%	0.00%		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Kabupaten/ Kota																													
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	20%	32.61	%	20	%	20	%	20	%	32.32	%	32.61	%	32.86	%	35.92	%	37.40	%	0	%	0	%	164.30 %	179.60%	187.01%	0.00 %	0.00 %		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya*	*20%*	*32.61*	%	*20*	%	*20*	%	*20*	%	*32.32*	%	*32.61*	%	*36.19*	%	*36.73*	%	*45.67*	%	*0*	%	*0*	%	*180.95 %*	*183.65%*	*228.35%*	*0.00 %*	*0.00 %*		
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit Usaha	120	Unit Usaha	60	Unit Usaha	60	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	76	Unit Usaha	91	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	126.67 %	151.67%	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan	3 Unit Usaha	6	Unit Usaha	3	Unit Usaha	3	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	3	Unit Usaha	3	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	100.00 %	100.00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	(N/A)	300	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		100	Unit Usaha	100	Unit Usaha	100	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		116	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	116.00%	0.00 %	0.00 %		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang berizin	(N/A)	7.03	%	55.11	%	56.45	%	57.80	%	6.38	%	7.03	%	54.98	%	4.29	%	0.00	%	0	%	0	%	99.76 %	7.60 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota*	*(N/A)*	*35*	*%*	*7*	*%*	*7*	*%*	*7*	*%*	*7*	*%*	*7*	*%*	*8.06*	*%*	*7.5*	*%*	*0.00*	*%*	*0*	*%*	*0*	*%*	*115.21 %*	*107.14%*	*0.00%*	*0.00 %*	*0.00 %*
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	(N/A)	744	Unit Usaha	744	Unit Usaha	744	Unit Usaha	744	Unit Usaha	744	Unit Usaha	744	Unit Usaha	25	Unit Usaha	3	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	3.36%	0.40 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota*	*(N/A)*	*8*	*%*	*4*	*%*	*8*	*%*	*0*	*%*	*0*	*%*	*0*	*%*	*20.83*	*%*	*29.41*	*%*	*0*	*%*	*0*	*%*	*0*	*%*	*520.75 %*	*367.63%*	*0,00%*	*0,00 %*	*0,00 %*
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	(N/A)	16	Unit Usaha	16	Unit Usaha	16	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	24	Unit Usaha	10	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	150.00 %	62.50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	9.50%	20.60	%	13.20	%	13.54	%	14.14	%	20.32	%	20.60	%	16.28	%	19.59	%	20.80	%	0	%	0	%	123.33 %	144.68%	147.10%	0.00 %	0.00 %		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi*	*3.40%*	*20*	%	*4*	%	*4*	%	*4*	%	*4*	%	*4*	%	*6.41*	%	*6.44*	%	*12.45*	%	*0*	%	*0*	%	*160.25 %*	*161.00%*	*311.25%*	*0.00 %*	*0.00 %*		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	480 Orang	1672	Orang	1102	Orang	420	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	182	Orang	420	Orang	96	Orang	0	Orang	0	Orang	16.52 %	100.00%	192.00%	0.00 %	0.00 %		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	0.50%	5	%	0.5	%	1	%	2	%	4.5	%	5	%	6.44	%	2.70	%	2.42	%	0	%	0	%	1288.00%	269.58%	120.82%	0.00 %	0.00 %		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi*	*100%*	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*0*	%	*0*	%	*100.00 %*	*100.00%*	*100.00%*	*0.00 %*	*0.00 %*		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(N/A)	327	Unit Usaha	215	Unit Usaha	112	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	262	Unit Usaha	110	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	121.86 %	98.21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	(N/A)	50	Keluarga	(N/A)		50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	(N/A)		50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0,00%	100.00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	(N/A)	30	Kelompok Masyarakat	(N/A)		(N/A)		10	Kelompok Masyarakat	10	Kelompok Masyarakat	10	Kelompok Masyarakat	(N/A)		(N/A)		39	Kelompok Masyarakat	0	Kelompok Masyarakat	0	Kelompok Masyarakat	0,00%	0,00 %	390.00%	0.00 %	0.00 %		
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	(N/A)	75	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		25	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	100.00%	0.00 %	0.00 %		
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	(N/A)	75	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		11	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	44.00 %	0.00 %	0.00 %		
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	(N/A)	75	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		3	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	12.00 %	0.00 %	0.00 %		
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	(N/A)	250	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		220	Unit Usaha	240	Unit Usaha	250	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		254	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	115.45%	0.00 %	0.00 %		
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	(N/A)	150	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	(N/A)		(N/A)		13	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%	0,00 %	26.00 %	0.00 %	0.00 %		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Nilai AKIP	75,87 Point	82.60	Point	78.35	Point	79.00	Point	80.00	Point	82.10	Point	82.60	Point	78.36	Point	81.10	Point	84.50	Point	0	Point	0	Point	100.01 %	102.66%	105.63%	0.00 %	0.00 %		
	Nilai IKM	82,22 Point	85.75	Point	82.89	Point	83.56	Point	84.23	Point	85.25	Point	85.75	Point	83.75	Point	85.89	Point	86.67	Point	0	Point	0	Point	101.04 %	102.79%	102.90%	0.00 %	0.00 %		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	93.71%	98.18	%	94.82	%	95.32	%	95.82	%	97.88	%	98.18	%	96.98	%	95.00	%	95.01	%	0	%	0	%	102.28 %	99.66 %	99.15 %	0.00 %	0.00 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*100%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*52*	*%*	*0*	*%*	*0*	*%*	*100.00 %*	*100.00%*	*52.00 %*	*0.00 %*	*0.00 %*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	120.00 %	120.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100.00 %	100.00%	200.00%	0.00 %	0.00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Dokumen	9	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	300.00 %	100.00%	150.00%	0.00 %	0.00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	300.00%	200.00%	300.00%	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	29	Laporan	5	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	5	Laporan	6	Laporan	7	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00%	100.00%	116.67%	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	28	Laporan	3	Laporan	4	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	3	Laporan	4	Laporan	8	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00%	100.00%	114.29%	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	(N/A)	2	Dokumen	(N/A)		(N/A)		(N/A)		1	Dokumen	1	Dokumen	(N/A)		(N/A)		(N/A)		0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	(N/A)	67	Data	(N/A)		(N/A)		(N/A)		67	Data	67	Data	(N/A)		(N/A)		(N/A)		0	Data	0	Data	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas*	*100%*	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*102.536 9979*	%	*100.00*	%	*0*	%	*0*	%	*100.00%*	*102.54%*	*100.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang / Bulan	36	Orang / Bulan	33	Orang / Bulan	33	Orang / Bulan	31	Orang / Bulan	36	Orang / Bulan	36	Orang / Bulan	33	Orang / Bulan	35	Orang / Bulan	35	Orang / Bulan	0	Orang / Bulan	0	Orang / Bulan	100.00%	106.06%	112.90%	0.00%	0.00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi	1 Dokumen	9	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100.00%	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Keuangan SKPD																												
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	(N/A)	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	200.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun	2 Laporan	22	Laporan	2	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	2	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																												
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD*	*100%*	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100*	%	*100.00*	%	*0*	%	*0*	%	*100.00%*	*100.00%*	*100.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	10	Laporan	2	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen administr*	*100%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100.00*	*%*	*0*	*%*	*0*	*%*	*100.00%*	*100.00%*	*100.00%*	*0.00%*	*0.00%*

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	asi kepegawaian																												
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	(N/A)	6	Paket	(N/A)		(N/A)		(N/A)		3	Paket	3	Paket	(N/A)		(N/A)		(N/A)		0	Paket	0	Paket	0,00%	0,00 %	0,00 %	0.00 %	0.00 %
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	17	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	3	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	300.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika	38 Orang	50	Orang	38	Orang	50	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	38	Orang	50	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	100.00 %	100.00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	n dan Pelatihan																												
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(N/A)	50	Orang	(N/A)		(N/A)		50	Orang	50	Orang	50	Orang	(N/A)		(N/A)		50	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00%	0,00 %	100.00%	0.00 %	0.00 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran*	*20%*	*100*	%	*17.97*	%	*40*	%	*60*	%	*80*	%	*100*	%	*17.97*	%	*37.14*	%	*57.14*	%	*0*	%	*0*	%	*100.00 %*	*92.85 %*	*95.23 %*	*0.00 %*	*0.00 %*
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	33	Paket	10	Paket	8	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	11	Paket	8	Paket	8	Paket	0	Paket	0	Paket	110.00 %	100.00%	160.00%	0.00 %	0.00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	41	Paket	6	Paket	8	Paket	9	Paket	9	Paket	9	Paket	9	Paket	8	Paket	11	Paket	0	Paket	0	Paket	150.00 %	100.00%	122.22%	0.00 %	0.00 %		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Laporan	9	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	200.00 %	100.00%	50.00 %	0.00 %	0.00 %		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	(N/A)	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0.00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	300.00 %	100.00%	33.33 %	0,00 %	0,00 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Aset dalam Kondisi Baik*	*93.71%*	*98.18*	%	*94.82*	%	*95.32*	%	*95.82*	%	*97.88*	%	*98.18*	%	*96.98*	%	*95.00*	%	*99.92*	%	*0*	%	*0*	%	*102.28 %*	*99.66 %*	*104.28%*	*0.00 %*	*0.00 %*
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	(N/A)	1	Unit	(N/A)		(N/A)		1	Unit	0	Unit	0	Unit	(N/A)		(N/A)		0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	0,00 %	0.00 %	0,00 %	0,00 %
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(N/A)	1	Unit	(N/A)		(N/A)		1	Unit	0	Unit	0	Unit	(N/A)		(N/A)		0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	0,00 %	0.00 %	0,00 %	0,00 %
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	27 Unit	116	Unit	2	Unit	4	Unit	100	Unit	5	Unit	5	Unit	2	Unit	4	Unit	50	Unit	0	Unit	0	Unit	100.00 %	100.00%	50.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	(N/A)	27	Unit	(N/A)		(N/A)		9	Unit	9	Unit	9	Unit	(N/A)		(N/A)		34	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	0,00 %	377.78%	0.00 %	0.00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Disediakan																												
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	(N/A)	5	Unit	(N/A)		(N/A)		5	Unit	0	Unit	0	Unit	(N/A)		(N/A)		0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	0,00 %	0.00 %	0,00 %	0,00 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(N/A)	1	Unit	(N/A)		(N/A)		1	Unit	0	Unit	0	Unit	(N/A)		(N/A)		0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	0,00 %	0.00 %	0,00 %	0,00 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(N/A)	3	Unit	(N/A)		(N/A)		3	Unit	0	Unit	0	Unit	(N/A)		(N/A)		0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	0,00 %	0.00 %	0,00 %	0,00 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran*	*20%*	*100*	%	*20*	%	*40*	%	*60*	%	*100*	%	*100*	%	*20*	%	*40*	%	*60.00*	%	*0*	%	*0*	%	*100.00 %*	*100.00%*	*100.00%*	*0.00 %*	*0.00 %*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumb	12 Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	er Daya Air dan Listrik yang Disediakan																												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100.00 %	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Aset dalam Kondisi Baik*	*93.71%*	*98.18*	*%*	*94.82*	*%*	*95.32*	*%*	*95.82*	*%*	*97.88*	*%*	*98.18*	*%*	*96.98*	*%*	*95.00*	*%*	*99.92*	*%*	*0*	*%*	*0*	*%*	*102.28 %*	*99.66 %*	*104.28%*	*0.00 %*	*0.00 %*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	100.00 %	100.00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	17	Unit	0	Unit	0	Unit	100.00 %	100.00%	94.44 %	0.00 %	0.00 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	(N/A)	1 Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0.00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	104 Unit	30	Unit	17	Unit	19	Unit	19	Unit	19	Unit	28	Unit	17	Unit	22	Unit	0	Unit	0	Unit	93.33 %	100.00%	115.79%	0.00 %	0.00 %
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	1	Unit	1	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	100.00 %	100.00%	50.00 %	0.00 %	0.00 %
																								121.29 %	103.37%	101.11%	0.00 %	0.00 %
																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Tabel 2.5 Hasil Evaluasi Anggara Kinerja pada Renstra Diskop UKM 2021-2026

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kapasitas Usaha Mikro	18,498,617,144	1,447,544,000	7,182,017,000	7,909,056,144	980,000,000	980,000,000	1,804,378,850	6,954,066,303	5,913,710,701	-	-	124.65 %	96.83 %	74.77 %	0.00%	0.00%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan PeriNinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan*	*18,498,617,144*	*1,447,544,000*	*7,182,017,000*	*7,909,056,144*	*980,000,000*	*980,000,000*	*1,804,378,850*	*6,954,066,303*	*5,913,710,701*	-	-	*124.65%*	*96.83%*	*74.77%*	*0.00%*	*0.00%*
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata potensi dan pengembangannya Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	371,500,000	221,500,000	150,000,000	-	-	-	213,647,550	113,897,250	-	-	-	96.45%	75.93 %	0,00%	0,00%	0,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2,430,951,000	783,451,000	697,000,000	750,500,000	100,000,000	100,000,000	862,600,900	388,401,200	1,080,150,033			110.10 %	55.72 %	143.92 %	0.00%	0.00%
Fasilitasi Kemudahan PeriNinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan PeriNinan	770,666,000	253,727,000	310,000,000	106,939,000	50,000,000	50,000,000	242,076,900	200,274,000	100,120,200			95.41%	64.60 %	93.62 %	0.00%	0.00%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	9,606,418,144	100,000,000	4,553,000,000	4,653,418,144	150,000,000	150,000,000	416,107,500	4,511,371,653	3,042,075,428			416.11 %	99.09 %	65.37 %	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	308,866,000	88,866,000	100,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	69,946,000	39,389,000	-			78.71%	39.39 %	0.00%	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan bagi UMKM																
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1,372,017,000	(N/A)	1,372,017,000	-	-	-	(N/A)	1,700,733,200	-			0,00%	123.96 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	276,000,000	(N/A)	(N/A)	176,000,000	50,000,000	50,000,000	(N/A)	(N/A)	51,469,200			0,00%	0,00%	29.24 %	0.00%	0.00%
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300,000,000	(N/A)	(N/A)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	(N/A)	(N/A)	96,420,500			0,00%	0,00%	96.42 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	350,000,000	(N/A)	(N/A)	250,000,000	50,000,000	50,000,000	(N/A)	(N/A)	223,198,000			0,00%	0,00%	89.28 %	0.00%	0.00%
Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150,000,000	(N/A)	(N/A)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	(N/A)	(N/A)	-			0,00%	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	450,000,000	(N/A)	(N/A)	350,000,000	50,000,000	50,000,000	(N/A)	(N/A)	338,991,300			0,00%	0,00%	96.85 %	0.00%	0.00%
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	149,329,000	(N/A)	(N/A)	49,329,000	50,000,000	50,000,000	(N/A)	(N/A)	-			0,00%	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	650,000,000	(N/A)	(N/A)	350,000,000	150,000,000	150,000,000	(N/A)	(N/A)	-			0,00%	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	120,000,000	(N/A)	(N/A)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	(N/A)	(N/A)	193,422,600			0,00%	0,00%	483.56 %	0.00%	0.00%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	1,192,870,000	(N/A)	(N/A)	992,870,000	100,000,000	100,000,000	(N/A)	(N/A)	787,863,440			0,00%	0,00%	79.35 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kewirausahaan																
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kualitas Usaha Mikro	9,915,063,841	3,543,650,573	2,656,913,268	1,014,500,000	1,350,000,000	1,350,000,000	16,790,257,496	1,854,518,602	973,038,490	-	-	473.81 %	69.80 %	95.91 %	0.00%	0.00%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan Usaha*	*9,915,063,841*	*3,543,650,573*	*2,656,913,268*	*1,014,500,000*	*1,350,000,000*	*1,350,000,000*	*16,790,257,496*	*1,854,518,602*	*973,038,490*	-	-	*473.81%*	*69.80%*	*95.91%*	*0.00%*	*0.00%*
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	6,200,563,841	3543650573	2,656,913,268	-	-	-	16,790,257,496	1,854,518,602	-			473.81 %	69.80 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	336,000,000	(N/A)	(N/A)	336,000,000	-	-	(N/A)	(N/A)	-			0,00%	0,00%	0.00%	0,00%	0,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	150,000,000	(N/A)	(N/A)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	(N/A)	(N/A)	49,173,000			0,00%	0,00%	98.35 %	0.00%	0.00%
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	578,500,000	(N/A)	(N/A)	378,500,000	100,000,000	100,000,000	(N/A)	(N/A)	551,959,800			0,00%	0,00%	145.83 %	0.00%	0.00%
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2,650,000,000	(N/A)	(N/A)	250,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	(N/A)	(N/A)	371,905,690			0,00%	0,00%	148.76 %	0.00%	0.00%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Patuh	3,564,304,000	737,152,000	937,152,000	690,000,000	600,000,000	600,000,000	715,856,696	488,402,118	503,693,900	-	-	97.11%	52.12 %	73.00 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi*	*3,564,304,000*	*737,152,000*	*937,152,000*	*690,000,000*	*600,000,000*	*600,000,000*	*715,856,696*	*488,402,118*	*503,693,900*	-	-	*97.11%*	*52.12%*	*73.00%*	*0.00%*	*0.00%*
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan																
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	916,950,000	408,475,000	508,475,000	-	-	-	398,946,896	265,898,618	-	-	-	97.67%	52.29 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenanga	757,354,000	328,677,000	428,677,000	-	-	-	316,909,800	222,503,500	-	-	-	96.42%	51.90 %	0,00%	0,00%	0,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kabupaten/Kota	n Kabupaten /Kota																
	Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai kepatuhannya																
	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengharga an koperasi berprestasi																
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembaga an Koperasi	950,000,000	(N/A)	(N/A)	350,000,000	300,000,000	300,000,000	(N/A)	(N/A)	270,810,700			0,00%	0,00%	77.37 %	0.00%	0.00%
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a Daerah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksa an dan Pengawasa n	940,000,000	(N/A)	(N/A)	340,000,000	300,000,000	300,000,000	(N/A)	(N/A)	232,883,200			0,00%	0,00%	68.50 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kabupaten/ Kota																	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	1,956,100,000	303,050,000	643,050,000	410,000,000	300,000,000	300,000,000	410,688,192	182,078,140	320,552,250	-	-	135.52 %	28.31 %	78.18 %	0.00%	0.00%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya*	*1,956,100,000*	*303,050,000*	*643,050,000*	*410,000,000*	*300,000,000*	*300,000,000*	*410,688,192*	*182,078,140*	*320,552,250*	-	-	*135.52%*	*28.31%*	*78.18%*	*0.00%*	*0.00%*
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	746,100,000	203,050,000	543,050,000	-	-	-	318,374,200	171,925,940	-			156.80 %	31.66 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan	200,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	92,313,992	10,152,200	-			92.31%	10.15 %	0,00%	0,00%	0,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	1,010,000,000	(N/A)	(N/A)	410,000,000	300,000,000	300,000,000	(N/A)	(N/A)	320,552,250			0,00%	0,00%	78.18 %	0.00%	0.00%
PROGRAM PELAYANAN ININ USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang beriNin	399,729,000	125,000,000	125,000,000	49,729,000	50,000,000	50,000,000	188,080,060	91,231,000	-	-	-	150.46 %	72.98 %	0.00%	0.00%	0.00%
Penerbitan INin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota*	*299,729,000*	*75,000,000*	*75,000,000*	*49,729,000*	*50,000,000*	*50,000,000*	*138,080,060*	*78,840,000*	-	-	-	*184.11%*	*105.12 %*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Fasilitasi Pemenuhan INin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	299,729,000	75,000,000	75,000,000	49,729,000	50,000,000	50,000,000	138,080,060	78,840,000	-	-	-	184.11 %	105.12 %	0.00%	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota																
Penerbitan INin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Penerbitan INin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota*	*100,000,000*	*50,000,000*	*50,000,000*	-	-	-	*50,000,000*	*12,391,000*	-	-	-	*100.00%*	*24.78%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
Fasilitasi Pemenuhan INin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	100,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	50,000,000	12,391,000	-	-	-	100.00 %	24.78 %	0,00%	0,00%	0,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	3,211,022,650	890,587,000	734,826,650	185,609,000	700,000,000	700,000,000	1,290,459,000	390,963,200	251,455,800	-	-	144.90 %	53.20 %	135.48 %	0.00%	0.00%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi*	*3,211,022,650*	*890,587,000*	*734,826,650*	*185,609,000*	*700,000,000*	*700,000,000*	*1,290,459,000*	*390,963,200*	*251,455,800*	-	-	*144.90%*	*53.20%*	*135.48 %*	*0.00%*	*0.00%*
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	3,211,022,650	890,587,000	734,826,650	185,609,000	700,000,000	700,000,000	1,290,459,000	390,963,200	251,455,800			144.90 %	53.20 %	135.48 %	0.00%	0.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	5,720,439,200	1,115,967,000	1,940,081,200	1,164,391,000	750,000,000	750,000,000	1,022,471,616	1,290,951,026	792,401,036	-	-	91.62%	66.54 %	68.05 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi*	*5,720,439,200*	*1,115,967,000*	*1,940,081,200*	*1,164,391,000*	*750,000,000*	*750,000,000*	*1,022,471,616*	*1,290,951,026*	*792,401,036*	-	-	*91.62%*	*66.54%*	*68.05%*	*0.00%*	*0.00%*
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	2,956,019,200	1,115,967,000	1,840,052,200	-	-	-	1,022,471,616	1,120,101,426	-			91.62%	60.87 %	0,00%	0,00%	0,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100,029,000	(N/A)	100,029,000	-	-	-	(N/A)	170,849,600	-			0,00%	170.80 %	0,00%	0,00%	0,00%
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	620,790,000	(N/A)	(N/A)	420,790,000	100,000,000	100,000,000	(N/A)	(N/A)	285,702,000			0,00%	0,00%	67.90 %	0.00%	0.00%
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	232,609,000	(N/A)	(N/A)	32,609,000	100,000,000	100,000,000	(N/A)	(N/A)	31,397,000			0,00%	0,00%	96.28 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	232,609,000	(N/A)	(N/A)	32,609,000	100,000,000	100,000,000	(N/A)	(N/A)	31,545,000			0,00%	0,00%	96.74 %	0.00%	0.00%
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	232,609,000	(N/A)	(N/A)	32,609,000	100,000,000	100,000,000	(N/A)	(N/A)	1,020,000			0,00%	0,00%	3.13%	0.00%	0.00%
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	286,440,000	(N/A)	(N/A)	86,440,000	100,000,000	100,000,000	(N/A)	(N/A)	85,580,000			0,00%	0,00%	99.01 %	0.00%	0.00%
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten /Kota	1,059,334,000	(N/A)	(N/A)	559,334,000	250,000,000	250,000,000	(N/A)	(N/A)	357,157,036			0,00%	0,00%	63.85 %	0.00%	0.00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Nilai IKM Persentase Aset dalam Kondisi Baik	57,342,019,780	9,047,725,000	11,475,675,742	12,471,029,818	12,173,794,610	12,173,794,610	9,012,811,611	9,918,849,174	11,197,880,947	-	-	99.61%	86.43 %	89.79 %	0.00%	0.00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan*	*1,237,420,263*	*263,000,000*	*300,501,200*	*285,202,663*	*194,358,200*	*194,358,200*	*225,241,843*	*296,325,100*	*225,417,200*	-	-	*85.64%*	*98.61%*	*79.04%*	*0.00%*	*0.00%*

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	756,166,138	155,000,000	181,321,200	139,844,938	140,000,000	140,000,000	113,291,404	172,043,100	87,138,000			73.09%	94.88 %	62.31 %	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50,500,000	7,000,000	7,500,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	5,398,444	11,562,000	13,466,100			77.12%	154.16 %	112.22 %	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	62,474,600	8,000,000	9,000,000	15,158,200	15,158,200	15,158,200	11,165,155	13,228,000	18,946,000			139.56 %	146.98 %	124.99 %	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	9,100,000	3,000,000	2,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,416,968	1,216,000	1,487,100			47.23%	48.64 %	123.93 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																
	Jumlah Dokumen Perubahan																
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,669,068	1,432,000	1,937,000			55.64%	71.60 %	96.85 %	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71,680,000	27,000,000	17,680,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	13,022,952	9,196,000	12,851,700			48.23%	52.01 %	142.80 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276,499,525	60,000,000	80,500,000	105,999,525	15,000,000	15,000,000	79,277,852	87,648,000	89,591,300			132.13 %	108.88 %	84.52 %	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20,000,000	(N/A)	(N/A)	(N/A)	10,000,000	10,000,000	(N/A)	(N/A)	(N/A)			0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	150,000,000	(N/A)	(N/A)	(N/A)	75,000,000	75,000,000	(N/A)	(N/A)	(N/A)			0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas*	*42,282,484,406*	*6,990,527,000*	*8,307,774,942*	*8,973,035,080*	*9,005,573,692*	*9,005,573,692*	*6,873,505,859*	*7,219,553,991*	*7,832,256,635*	-	-	*98.33%*	*86.90%*	*87.29%*	*0.00%*	*0.00%*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42,002,162,026	6,959,027,000	8,274,074,942	8,900,912,700	8,934,073,692	8,934,073,692	6,841,501,809	7,161,987,991	7,809,663,135			98.31%	86.56 %	87.74 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	149,122,380	8,000,000	6,200,000	44,922,380	45,000,000	45,000,000	11,231,990	40,982,000	2,918,500			140.40 %	661.00 %	6.50%	0.00%	0.00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32,500,000	2,000,000	8,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	2,699,936	5,432,000	7,055,000			135.00 %	67.90 %	94.07 %	0.00%	0.00%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	11,000,000	2,500,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,609,968	764,000	1,500,000			64.40%	30.56 %	75.00 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	85,700,000	17,000,000	17,000,000	17,700,000	17,000,000	17,000,000	16,462,156	10,388,000	11,120,000			96.84%	61.11 %	62.82 %	0.00%	0.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD*	*171,490,780*	*10,500,000*	*20,000,000*	*46,990,780*	*47,000,000*	*47,000,000*	*158,499,100*	*13,574,000*	*4,320,000*	-	-	*1509.52 %*	*67.87%*	*9.19%*	*0.00%*	*0.00%*
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7,000,000	3,500,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	437,900	-	-			12.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	10,500,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,646,000	1,864,000	1,500,000			54.87%	62.13 %	100.00 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Daerah pada SKPD																
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	153,990,780	4,000,000	15,000,000	44,990,780	45,000,000	45,000,000	156,415,200	11,710,000	2,820,000			3910.38 %	78.07 %	6.27%	0.00%	0.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian*	*1,212,429,780*	*175,550,000*	*178,900,000*	*227,259,780*	*315,360,000*	*315,360,000*	*155,295,066*	*221,407,500*	*323,596,800*	-	-	*88.46%*	*123.76 %*	*142.39 %*	*0.00%*	*0.00%*
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	176,000,000	(N/A)	(N/A)	(N/A)	88,000,000	88,000,000	(N/A)	(N/A)	(N/A)			0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	173,899,780	12,000,000	15,000,000	48,899,780	49,000,000	49,000,000	9,204,968	43,564,000	124,394,800			76.71%	290.43 %	254.39 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	17,000,000	5,500,000	5,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	5,999,836	2,432,000	1,000,000			109.09 %	44.22 %	50.00 %	0.00%	0.00%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	9,000,000	3,500,000	4,000,000	500,000	500,000	500,000	2,313,752	642,000	500,000			66.11%	16.05 %	100.00 %	0.00%	0.00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	308,950,000	154,550,000	154,400,000	-	-	-	137,776,510	174,769,500	-			89.15%	113.19 %	0,00%	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	527,580,000	(N/A)	(N/A)	175,860,000	175,860,000	175,860,000	(N/A)	(N/A)	197,702,000			0,00%	0,00%	112.42 %	0.00%	0.00%
Administrasi Umum	*Persentase Ketersediaan*	*2,375,224,780*	*520,400,000*	*667,039,800*	*527,784,980*	*330,000,000*	*330,000,000*	*633,969,697*	*565,002,294*	*427,070,165*	-	-	*121.82%*	*84.70%*	*80.92%*	*0.00%*	*0.00%*

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perangkat Daerah	*Operasional Perkantoran*																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42,450,000	10,000,000	16,450,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	7,274,340	9,976,625	4,998,774			72.74%	60.65 %	83.31 %	0.00%	0.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	468,665,200	150,000,000	115,665,200	73,000,000	65,000,000	65,000,000	191,622,750	135,121,262	98,698,100			127.75 %	116.82 %	135.20 %	0.00%	0.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58,200,000	10,000,000	18,200,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,822,600	10,000,000			100.00 %	59.46 %	100.00 %	0.00%	0.00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	245,500,000	40,000,000	85,500,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	51,026,950	33,268,650	43,900,840			127.57 %	38.91 %	109.75 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	61,625,000	10,000,000	18,500,000	13,125,000	10,000,000	10,000,000	12,060,000	13,125,000	9,850,000			120.60 %	70.95 %	75.05 %	0.00%	0.00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	25,400,000	25,400,000	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	133,940,000	20,000,000	49,940,000	24,000,000	20,000,000	20,000,000	22,250,000	25,705,000	17,575,000			111.25 %	51.47 %	73.23 %	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,075,084,600	180,000,000	283,084,600	252,000,000	180,000,000	180,000,000	283,177,857	285,267,157	233,770,451			157.32 %	100.77 %	92.77 %	0.00%	0.00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	264,359,980	75,000,000	79,700,000	109,659,980	-	-	56,557,800	51,716,000	8,277,000			75.41%	64.89 %	7.55%	0,00%	0,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Aset dalam Kondisi Baik*	*719,760,020*	*6,461,000*	*15,713,600*	*507,585,420*	*95,000,000*	*95,000,000*	*6,327,000*	*21,338,500*	*200,141,650*	-	-	*97.93%*	*135.80 %*	*39.43%*	*0.00%*	*0.00%*
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	167,400,000	(N/A)	(N/A)	167,400,000	-	-	(N/A)	(N/A)	-			0,00%	0,00%	0.00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64,800,000	(N/A)	(N/A)	64,800,000	-	-	(N/A)	(N/A)	-			0,00%	0,00%	0.00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	183,984,600	6,461,000	15,713,600	61,810,000	50,000,000	50,000,000	6,327,000	21,338,500	30,905,000			97.93%	135.80 %	50.00 %	0.00%	0.00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	167,148,200	(N/A)	(N/A)	77,148,200	45,000,000	45,000,000	(N/A)	(N/A)	169,236,650			0,00%	0,00%	219.37 %	0.00%	0.00%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3,480,000	(N/A)	(N/A)	3,480,000	-	-	(N/A)	(N/A)	-			0,00%	0,00%	0.00%	0,00%	0,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50,947,220	(N/A)	(N/A)	50,947,220	-	-	(N/A)	(N/A)	-			0,00%	0,00%	0.00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	82,000,000	(N/A)	(N/A)	82,000,000	-	-	(N/A)	(N/A)	-			0,00%	0,00%	0.00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran*	*6,899,755,415*	*551,938,000*	*1,410,138,200*	*1,437,279,215*	*1,750,200,000*	*1,750,200,000*	*614,115,704*	*1,279,177,917*	*1,785,488,038*	-	-	*111.27%*	*90.71%*	*124.23%*	*0.00%*	*0.00%*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	819,002,115	47,275,000	183,811,800	195,915,315	196,000,000	196,000,000	42,293,323	100,206,717	78,418,918			89.46%	54.52%	40.03%	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6,080,753,300	504,663,000	1,226,326,400	1,241,363,900	1,554,200,000	1,554,200,000	571,822,381	1,178,971,200	1,707,069,120			113.31 %	96.14 %	137.52 %	0.00%	0.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Aset dalam Kondisi Baik*	*2,443,454,336*	*529,349,000*	*575,608,000*	*465,891,900*	*436,302,718*	*436,302,718*	*345,857,342*	*302,469,872*	*399,590,459*	-	-	*65.34%*	*52.55%*	*85.77%*	*0.00%*	*0.00%*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68,080,000	27,750,000	40,330,000	-	-	-	26,090,132	43,670,300	-			94.02%	108.28 %	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan PeriNinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan PeriNinannya	1,003,380,000	140,700,000	317,540,000	181,140,000	182,000,000	182,000,000	98,918,304	149,073,272	49,190,200			70.30%	46.95 %	27.16 %	0.00%	0.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target Renstra Diskop-UKM Kab.Bandung Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	6
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-		-	-			0.00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121,560,000	36,000,000	45,230,000	13,330,000	13,500,000	13,500,000	56,403,172	22,720,300	25,227,684			156.68 %	50.23 %	189.25 %	0.00%	0.00%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1,244,434,336	318,899,000	172,508,000	271,421,900	240,802,718	240,802,718	164,445,734	87,006,000	325,172,575			51.57%	50.44 %	119.80 %	0.00%	0.00%
												Rata-rata Capaian Anggaran (%)	180.92 %	87.68 %	82.30 %	0.00%	0.00%
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Evaluasi pelaksanaan Renstra 2021-2026 menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja seluruh program selama periode 2022 – 2024 mencapai target dengan rata – rata capaian 100%.

Pada tahun 2024, capaian kinerja program tercatat 101.11%, tahun 2023 sebesar 103,37% maupun tahun 2022 sebesar 121.29%. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar indikator kinerja program telah terpenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan variasi yang signifikan antar tahun dan antar program. Rasio antara realisasi dan anggaran menjadi indikator utama dalam menilai efisiensi pelaksanaan anggaran.

1) Tahun 2022 mencatat sejumlah program dengan rasio realisasi tinggi, seperti :
   a) Program Pengembangan UMKM (473,81%)
   b) Program Pemberdayaan UMKM (124,65%)
   c) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (150,46%)
   d) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (144,90%)

   Rasio di atas 100% mengindikasikan fleksibilitas dan responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan riil di lapangan.
2) Tahun 2023 menunjukkan sejumlah kelemahan, dengan beberapa program yang memiliki rasio realisasi rendah, di antaranya :
   a) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (28,31%)
   b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (52,12%)
   c) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (66,54%)
3) Tahun 2024 relatif lebih stabil, dengan rasio realisasi mendekati target pada beberapa program, seperti:
   a) Program Pengembangan UMKM (95,91%)
   b) Program Pemberdayaan UMKM (74,77%)

Kesenjangan (*gap*) antara anggaran dan realisasi menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi program. Gap yang terlalu tinggi dapat berdampak pada tertundanya manfaat pelayanan publik. Beberapa program dengan realisasi rendah menunjukkan bahwa pelayanan yang direncanakan belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat sasaran, terutama dalam aspek pengawasan koperasi. Berdasarkan hasil analisis, beberapa faktor utama yang memengaruhi pencapaian realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan jumlah dan kapasitas personil, khususnya di bidang teknis seperti pengawasan koperasi menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran yang optimal.
2) Kegiatan yang tergantung pada kesiapan pihak eksternal sering kali mengalami hambatan teknis dan administratif.
3) Realisasi anggaran yang melampaui target pada beberapa program menunjukkan bahwa perangkat daerah memiliki kapasitas adaptif terhadap kebutuhan lapangan, meskipun perlu dikelola dengan prinsip akuntabilitas.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Bandung serta sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung menetapkan kelompok sasaran pelayanan yang menjadi prioritas intervensi program dan kegiatan. Penetapan kelompok sasaran ini dilakukan secara teknokratik dengan mempertimbangkan mandat kewenangan perangkat daerah, isu strategis sektoral, potensi lokal, dan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Kelompok sasaran pelayanan Dinas Koperasi dan UKM meliputi :

1) Koperasi aktif dan potensial

   Koperasi yang telah berbadan hukum dan menjalankan kegiatan usaha secara aktif, termasuk koperasi sehat.

Koperasi ini menjadi prioritas dalam pelayanan penguatan kelembagaan, peningkatan tata kelola berbasis prinsip koperasi, digitalisasi dan inovasi usaha.

2) Pelaku Usaha Mikro

Pelaku usaha berskala mikro yang tersebar di berbagai sektor ekonomi lokal. Pelaku usaha ini merupakan sasaran utama program pemberdayaan ekonomi rakyat, pendampingan kewirausahaan dan peningkatan kualitas produk dan SDM.

3) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Koperasi ini menjadi fokus intervensi strategis dalam periode Renstra Tahun 2025 - 2029. Koperasi Merah Putih diarahkan menjadi entitas ekonomi masyarakat yang tidak hanya menjalankan fungsi usaha, tetapi juga menjadi simpul pembangunan desa. Kelompok ini menjadi prioritas lintas program dan memerlukan dukungan intensif dalam pembentukan, pembinaan, serta penguatan model bisnis yang sesuai dengan karakteristik desa masing-masing.

4) Kelompok masyarakat potensial wirausaha

Kelompok Usaha diberbagai sektor ekonomi, termasuk kelompok pemuda, perempuan, kelompok disabilitas, dan pelaku ekonomi kreatif yang memiliki potensi dan minat berwirausaha. Kelompok ini menjadi target pembinaan inkubasi usaha, penumbuhan wirausaha baru, dan fasilitasi pembentukan Koperasi potensial.

5) Lembaga pendukung Koperasi dan UKM

Lembaga inkubator bisnis, lembaga usaha, perguruan tinggi, asosiasi koperasi dan UMKM, serta mitra pembiayaan. Kelompok ini menjadi mitra strategis dalam membangun kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas layanan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pemilihan kelompok sasaran tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM tepat sasaran,

terukur, dan selaras dengan indikator kinerja utama. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kontribusi koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung menyadari bahwa efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat dijalankan secara mandiri. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi antar-pihak menjadi strategi utama dalam mendukung keberhasilan program. Mitra strategis Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan meliputi:

1) Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung
   Beberapa PD memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan Dinas, seperti: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, DALDUKPPA, Dinas Pemuda dan Olahraga, BKAD dan Bapperida.
2) Pemerintah Desa dan Kelurahan
   Dinas memfasilitasi pembentukan dan pendampingan koperasi desa/kelurahan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
3) Lembaga Keuangan dan Perbankan
   Kemitraan dengan lembaga keuangan, khususnya bank pemerintah dan BUMD, difokuskan untuk mendukung akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, sekaligus penguatan literasi keuangan pelaku usaha.
4) Komunitas dan Forum UMKM/Koperasi
   Sebagai representasi pelaku ekonomi rakyat, komunitas berperan dalam menjembatani komunikasi antara Dinas dan anggotanya. Mereka juga terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan, dan promosi produk unggulan daerah.
5) Perguruan Tinggi dan Inkubator Bisnis
   Keterlibatan perguruan tinggi dalam program pelatihan, riset, dan inkubasi bisnis menjadi nilai tambah dalam proses

peningkatan kapasitas pelaku usaha. Kerja sama ini juga membuka peluang integrasi antara dunia akademik dan dunia usaha.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan, PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) memainkan peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, khususnya dalam aspek peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan koperasi. Dalam periode perencanaan tahun 2021-2026, PT BPR Kerta Raharja berkontribusi melalui pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan yang difokuskan untuk mendukung keberlangsungan dan penguatan pelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat potensial. Berdasarkan data total penyaluran sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 88.703.447.045,- untuk 40.775 Orang.

Kontribusi PT BPR Kerta Raharja melalui program ini mendukung pencapaian indikator strategis Dinas Koperasi dan UKM, khususnya Peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memiliki akses pembiayaan formal. Pada tahun 2025 - 2029 sinergi antara Dinas Koperasi dan UKM dan PT BPR Kerta Raharja akan terus diperkuat melalui :

1) Peningkatan fasilitasi Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Jaminan;
2) Pengembangan platform pelaporan dana bergulir.

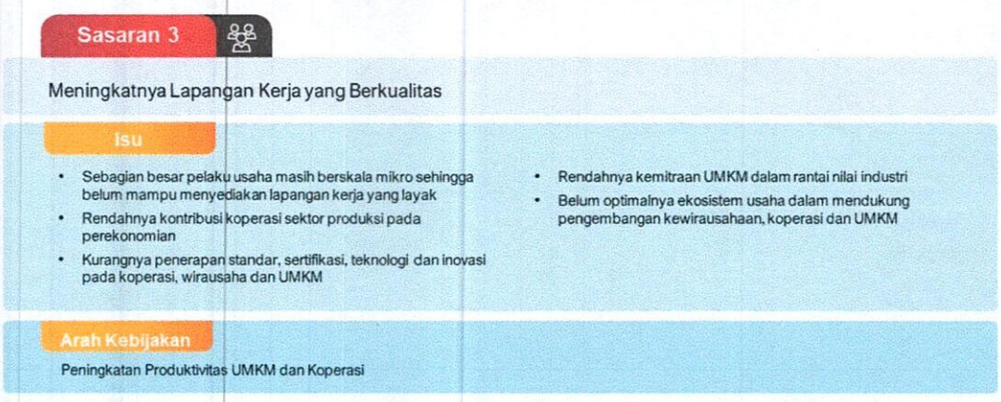
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, Koperasi dan UMKM masuk dalam bagian Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta

Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Gambar 2.14 Isu Sasaran 3 RPJMN 2025 – 2029



Sumber : Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital ditujukan guna pemenuhan pelayanan dasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak. Hal ini memerlukan penguatan konektivitas, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan industri. Selain itu, perlu mendorong generasi muda agar masuk dunia kewirausahaan, menghadirkan inovasi, dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang. Inovasi juga diperlukan dalam pengembangan industri kreatif nasional. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur yang terencana, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, dan memastikan kesempatan yang adil bagi setiap warga. Melalui strategi terintegrasi ini, kita bergerak menuju sebuah masa depan yang lebih memberikan manfaat bagi semua elemen masyarakat. Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta

mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 dan tahun 2029 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	1,1	1,2
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,3 (2019)	1,4	1,6
3	Rasio Kewirausahaan (%)	3,0 (2023)	3,1	3,6

Sumber : Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029

2.1.1 Review Renstra K/L dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mendukung pencapaian misi ke- 2 Gubernur Jawa Barat yaitu : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif, melalui tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi berbasis sumber daya lokal dan teknologi. Adapun sasaran yang akan dicapai diantaranya yaitu :

1) Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang ramah lingkungan dan Inklusif;
2) Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah;
3) Meningkatnya penerapan ekonomi hijau dan biru;
4) Mewujudkan transformasi digital;
5) Meningkatnya ketahanan pangan.

Isu produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian, mencakup: Kawasan Pantura sebagai basis industri hijau, perikanan dan ketahanan pangan; optimalisasi pengembangan ekowisata terintegrasi; pengembangan IKM dan UKM; optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi pariwisata dan ekraf; peningkatan investasi dan promosi investasi industri; peningkatan produktivitas tenaga kerja industri; pengembangan pariwisata kelas dunia; kerjasama perdagangan dalam penguatan rantai pasok pangan berkualitas; Jawa Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan berkualitas; link an match antara industri dan sektor hulu; dan mengembangkan rantai nilai regional pada produk-produk yang berdaya saing di pasar internasional.

Adapun isu UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, mencakup: peran pemuda dalam kewirausahaan; peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; optimalisasi pertumbuhan startup; pemberdayaan UMKM dan startup; penguatan IKM dan UMKM; pemberdayaan UMKM dan koperasi; peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, UMKM dan Industri); pelatihan dan pemasaran digital produk UMKM; integrasi pengembangan ekraf; pemberdayaan UMKM dan koperasi wilayah perbatasan; kewirausahaan yang berkelanjutan melalui UKM; dan komoditas pertanian sebagai komoditas wirausaha/bisnis.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung 2025 - 2029 diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Bandung 2025 - 2029. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
- Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
- Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029, yaitu :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;

3) Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5) Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung diatas, misi yang secara langsung berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UKM adalah misi 2 yaitu "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan", dan misi 3 yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel. Secara jelas maka penjabaran misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan

  Membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem.

  Dalam konteks Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, terutama di sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Bupati Bandung dapat mengambil langkah-langkah spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi

dari sektor ini. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan:

1. Penguatan Koperasi:
   - Mendorong pembentukan koperasi di berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan ekonomi.
   - Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota koperasi untuk meningkatkan manajemen, produksi, dan pemasaran.
2. Akses ke Finansial:
   - Memfasilitasi akses Koperasi dan UKM ke sumber pembiayaan, baik melalui program perbankan, bantuan pemerintah, atau skema kredit mikro.
   - Mendorong perkembangan lembaga keuangan inklusif dan layanan keuangan berbasis teknologi untuk mendukung UKM yang memiliki akses terbatas ke perbankan tradisional.
3. Pelatihan dan Pendidikan:
   - Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan produksi bagi pemilik UKM dan anggota koperasi.
   - Mendukung kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan sektor Koperasi dan UKM.
4. Pemasaran dan Promosi:
   - Membantu UKM dan koperasi dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan visibilitas produk dan layanan.
   - Mengorganisir pameran, pasar, atau festival untuk mempromosikan produk lokal dan mendukung pertumbuhan bisnis.
5. Infrastruktur Dukungan:
   - Memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan akses transportasi yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional UKM dan koperasi.

- Meningkatkan konektivitas dan fasilitas distribusi untuk memudahkan distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas.

6. Inovasi dan Digitalisasi:
   - Mendorong adopsi teknologi dan digitalisasi di kalangan UKM dan koperasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.
   - Memberikan dukungan teknis dan pelatihan untuk mengimplementasikan solusi digital dalam manajemen bisnis dan pemasaran.
7. Kemitraan dengan Sektor Swasta:
   - Membangun kemitraan strategis antara Koperasi dan UKM dengan perusahaan swasta untuk mengakses pasar yang lebih besar.
   - Memfasilitasi kerjasama dalam rantai pasok untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
8. Pengembangan Produk Berbasis Lokal:
   - Mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan berbasis lokal yang dapat membedakan UKM dan koperasi di pasar.
   - Memberikan dukungan untuk sertifikasi dan standarisasi produk agar dapat memenuhi persyaratan pasar yang lebih tinggi.
9. Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Lokal:
   - Memfokuskan program pemberdayaan pada perempuan dan komunitas lokal untuk meningkatkan inklusi dan distribusi manfaat secara merata.
   - Mendorong kehadiran perempuan dalam kegiatan ekonomi dan kepemimpinan di sektor Koperasi dan UKM.
10. Monitoring dan Evaluasi:
   - Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak dari berbagai inisiatif yang diimplementasikan.

- Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi untuk mendapatkan umpan balik yang berharga.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Bupati Bandung berharap dapat memberdayakan sektor Koperasi dan UKM, meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerahnya.

- Misi 3 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

  Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

  Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada

akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Adapun isu strategis Kabupaten Bandung sebagaimana RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.7 Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029

Urutan Prioritas	Isu Strategis
1	Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana
2	Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
4	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
5	Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah
6	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
7	Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024 - 2044. Berdasarkan telaahan terhadap dokumen RTRW untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025 - 2029, tidak diketahui adanya rencana yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM. Hal ini dikarenakan rencana yang ada dalam RTRW merupakan rencana yang dilaksanakan secara makro, sedangkan untuk perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UKM adalah skala mikro/kecil, sehingga tidak dapat tergambarkan secara eksplisit dalam RTRW Kabupaten Bandung.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan tujuan global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial,

KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, KLHS tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target SDGs.

Sejak tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs, tetapi dengan cakupan yang lebih luas. Jika MDGs hanya memiliki 8 tujuan, SDGs menetapkan 17 tujuan dengan 169 target yang dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan global. SDGs berfokus pada tiga aspek utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. SDGs disusun sebagai kelanjutan dari keberhasilan MDGs dan mencakup lebih banyak aspek kehidupan. Pelaksanaannya didasarkan pada lima pilar utama, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Untuk mencapai target pada tahun 2030, ditetapkan 17 tujuan global sebagai pedoman utama.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah upaya global untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. TPB mencakup berbagai dimensi seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan ini, terdapat 17 tujuan utama yang harus dipenuhi, antara lain penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan terhadap ekosistem darat dan laut. Kabupaten Bandung sebagai bagian dari komitmen nasional terus berupaya mencapai target TPB dengan berbagai strategi dan kebijakan.

Capaian TPB di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Dari total 203 indikator yang ditetapkan, sekitar 59,61% telah mencapai target nasional, sementara 27,09% masih belum mencapai target. Selain itu, terdapat 3,45% indikator yang memerlukan pendataan lebih lanjut, dan 9,85% indikator tidak memiliki data. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya akses terhadap sanitasi layak, masih tingginya angka *stunting*, serta

belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi daerah. Oleh karena itu, strategi ke depan akan difokuskan pada peningkatan pendataan, optimalisasi kebijakan, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Dalam merumuskan isu strategis TPB, Kabupaten Bandung memperhatikan berbagai faktor seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kebijakan pembangunan daerah, serta hasil evaluasi capaian TPB. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategis, untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri masuk kedalam TPB 8, TPB 9, TBP 17 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor eknomi berakibat kurangnya peningkatan daya saing	TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
		TPB 9: Industri, inovasi, dan infrstruktur Membangun infrastruktur yang tangguh, mningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, srta mendorong inovasi
		TPB 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah permasalahan yang aktufal/krusial/penting yang dihadapi PD, diidentifikasi melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan PD dalam upaya meciptakan pelayanan publik dalam mencapai visi, misi kepala daerah. Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKM, maka dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung perlu menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung upaya tersebut. ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurang Optimalnya Kelembagaan Koperasi	a. Sistem Pengawasan Kelembagaan Koperasi belum efektif	1) Tidak adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap koperasi yang tidak patuh /tidak melaksanakan RAT 2) Belum seluruh Koperasi dilakukan Pemeriksaan / Pengawasan 3) Belum Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pengawasan 4) Regulasi Perizinan terlalu rumit 5) Belum adanya strategi dan rencana pengawasan Koperasi bermasalah 6) Kurangnya jumlah SDM Aparatur pengawas koperasi 7) Kurangnya SDM Aparatur pengawas koperasi yang kompeten
		b. Pengurus dan Pengawas tidak memiliki kapasitas yang cukup	1) Pengurus dan Pengawas tidak pada usia Produktif 2) Kurangnya regenerasi SDM Koperasi 3) Kurangnya Minat SDM Koperasi dalam mengikuti pelatihan
		c. Banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan dan melaporkan RAT	1) Kurangnya Pemahaman Koperasi tentang Tata cara Pelaksanaan RAT 2) Kurangnya Minat SDM Koperasi dalam mengikuti pelatihan 3) Kurangnya SDM Pendamping Koperasi 4) Tidak Adanya Reward bagi Koperasi yang Melaporkan RAT
		d. Efektivitas dan relevansi pelatihan koperasi belum Optimal	1) Metode Pelatihan yang belum efektif 2) Klasifikasi koperasi belum berdasarkan kebutuhan dan karakternya 3) Pelatihan yang dilaksanakan belum menyeluruh 4) Pelatihan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berbasis uji kompetensi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Kurang Optimalnya Pengembangan Usaha Koperasi	a. Koperasi masih menggunakan metode bisnis yang Konservatif /mempertahankan kebiasaan	1) Masih terbatasnya Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi 2) Masih terbatasnya permodalan dan akses pembiayaan bagi koperasi 3) Kurangnya keterampilan dan wawasan Koperasi dalam inovasi bisnis
		b. Pemanfaatan teknologi di koperasi masih rendah	1) Kurangnya akses atau pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan 2) Persaingan dengan Badan Usaha lain
		c. Kurangnya Manfaat Koperasi bagi Anggota dan Masyarakat	1) Kurangnya edukasi dan pemahaman anggota dan masyarakat tentang koperasi 2) Minimnya layanan dan produk koperasi yang menarik 3) Kurangnya riset pasar dan pemahaman terhadap kebutuhan anggota
		d. Sistem Pengawasan Usaha Koperasi belum efektif	1) Regulasi Perizinan terlalu rumit 2) Kurangnya jumlah SDM Aparatur pengawas koperasi 3) Kurangnya SDM Aparatur pengawas koperasi yang kompeten 4) Kurangnya SDM Pendamping Koperasi
3.	Keterbatasan Akses Sumber Daya dan Kapasitas Usaha Mikro	Usaha Mikro kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan	Kurangnya agunan, literasi keuangan rendah, prosedur pengajuan rumit
		Banyak Usaha Mikro tidak memiliki izin usaha	Proses legalisasi dianggap rumit dan mahal, Kurangnya sosialisasi perizinan *online (Online Single Submission)*
		Keterbatasan data Usaha Mikro yang akurat dan terintegrasi	Belum ada sistem basis data terpadu dan pemutakhiran rutin
		Pelaku Usaha Mikro kurang pengetahuan manajerial dan kewirausahaan	Minimnya pelatihan yang tepat guna dan berkelanjutan
		Kurangnya kesadaran akan pentingnya	Fokus pada kegiatan operasional harian tanpa pengembangan diri

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		peningkatan kapasitas diri	
4.	Belum Optimalnya Daya Saing dan Pemasaran Produk Usaha Mikro	Produk Usaha Mikro kalah bersaing dari sisi kualitas dan desain	Kurangnya pelatihan teknis
		Minimnya inovasi dalam proses dan teknologi produksi	Terbatasnya akses terhadap teknologi baru dan pendampingan inovasi
		Produk Usaha Mikro kurang dikenal di pasar lokal maupun luar daerah	Kurangnya Pelatihan strategi branding
		Rendahnya pemanfaatan digital marketing dan *e-commerce*	Kurangnya pelatihan pemasaran *online*

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2025

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Sehingga, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai telaahan isu nasional, regional dan daerah. Berdasarkan identifikasi dari berbagai telaahan isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan isu strategis dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dilakukan dengan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi pembangunan daerah. Proses ini mencakup analisis mendalam terhadap faktor internal dan eksternal yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan program pembangunan. Faktor internal meliputi potensi dan permasalahan koperasi dan UMKM sedangkan faktor eksternal mencakup kebijakan nasional,

dinamika global, serta perkembangan ekonomi di tingkat regional. Isu strategis Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan di Kabupaten Bandung urusan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1) Optimalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi
2) Optimalisasi Skala dan Inovasi Usaha Koperasi
3) Optimalisasi Daya Saing Produk dan Akses Pasar Pelaku Usaha Mikro
4) Peningkatan Akses Sumber Daya dan Kompetensi Usaha Mikro

2.2.6.1 Implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 telah menetapkan arah kebijakan strategis untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung. Inpres ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat struktur ekonomi rakyat melalui penguatan kelembagaan koperasi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan berfungsi sebagai simpul penguatan ekonomi rakayat di tingkat desa dan kelurahan, dengan peran sebagai agregator produksi, *off-taker* hasil usaha masyarakat, sekaligus pusat distribusi dan layanan ekonomi produktif. Koperasi ini dirancang untuk menyinergikan berbagai potensi ekonomi desa dan kelurahan secara terpadu, meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi tawar pelaku usaha lokal, khususnya UMKM dan petani.

Dalam konteks Kabupaten Bandung, yang memiliki 270 desa dan 10 kelurahan, kebijakan ini menjadi peluang strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun, agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi program simbolik, maka perlu

dirumuskan kebijakan turunan di daerah yang berbasis pada pemetaan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan kelembagaan koperasi.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung memiliki peran sentral dalam menyusun langkah-langkah implementatif, seperti penyusunan roadmap pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta dan BUMDes, serta integrasi program pemberdayaan lintas OPD. Upaya ini harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan agenda pembangunan daerah serta RPJMN 2025 - 2029.

Tabel 2.10 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengembangan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi mendukung pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan terus didorong	1. Kurang Optimalnya Kelembagaan Koperasi 2. Kurang Optimalnya Pengembangan Usaha Koperasi 3. Belum Optimalnya Daya Saing dan Pemasaran Produk Usaha Mikro 4. Keterbatasan Akses Sumber Daya dan Kapasitas Usaha Mikro	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor eknomi berakibat kurangnya peningkatan daya saing	1. Transformasi Ekonomi Digital dan Disrupsi Teknologi 2. Geopolitik Global dan Ketidakpastian Ekonomi Internasional 3. TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 4. TPB 9: Industri, inovasi, dan infrstruktur Membangun infrastruktur yang tangguh, mningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, srta mendorong inovasi 5. TPB 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	1. Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian 2. Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi pada Koperasi, Wirausaha dan UMKM 3. Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industry 4. Sebagian besar pelaku usaha masih berskla mikro sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak 5. Belum optimalnya ekosistem usaha dalam mendukung pengembangan kewirausahaan, koperasi dan UMKM	Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan	1. Optimalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi 2. Optimalisasi Skala dan Inovasi Usaha Koperasi 3. Optimalisasi Daya Saing Produk dan Akses Pasar Pelaku Usaha Mikro 4. Peningkatan Akses Sumber Daya dan Kompetensi Usaha Mikro

Sumber : Analisis Diskop UKM, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Berdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, dan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Untuk mencapai visi dan misi Bupati Bandung 2025 – 2029 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam 5 tahun kedepan.

3.1.1 Tujuan

Rumusan pernyataan tujuan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 yaitu: Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian Daerah.

3.1.2 Sasaran

Dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung tahun 2025 - 2029, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran utama yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro

   Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas usaha mikro melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro, fasilitasi legalitas dan kelembagaan usaha, peningkatan kemitraan usaha dan akses pembiayaan, serta peningkatan kualitas produk dan akses pasar, termasuk digitalisasi usaha.

2. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

   Sasaran ini diarahkan untuk mendorong Peningkatan tata kelola koperasi melalui RAT, pelaporan keuangan, dan optimalisasi pengawasan koperasi, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi, serta penguatan koperasi sektor riil dan koperasi berbasis potensi lokal, termasuk koperasi desa/kelurahan.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Diskop-UKM

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian Daerah		Rasio Kewirausahaan Daerah	3.75-3.84	3.83-3.92	3.98-4.07	4.45-4.56	4.56-4.67	5.03-5.15	Jumlah Usaha Mikro ---------- x 100% Jumlah angkatan kerja
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0.32-0.35	0.33-0.36	0.34-0.37	0.34-0.38	0.35-0.39	0.36-0.40	Volume Usaha Koperasi ---------- x 100% PDRB ADHB
		Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Proporsi Jumlah Usaha Mikro	70.67%	71.05%	71.57%	72.21%	72.97%	73.84%	Jumlah Usaha Mikro ber NIB ---------- x 100% Jumlah UMKM ber NIB
		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	14.45%	10.72%	9.93%	10.11%	10.29%	10.43%	Jumlah Koperasi Sehat ---------- x 100% jumlah koperasi yg melaksanakan RAT

Sumber : Analisis Diskop UKM, 2025

3.2 Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas serta kesesuaian dengan konsep pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bandung, tema pembangunan untuk Tahap I periode 2025 - 2029 adalah pondasi (Dadasar / Mondasi). Tahap fondasi dalam pembangunan merupakan landasan arah bagi seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung dimasa mendatang, dengan memperhatikan secara cermat dan fokus, pembangunan ini dapat lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Memperhatikan hal - hal tersebut di atas, maka terdapat 8 (delapan) strategi utama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Tabel 3.2 Strategi Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	1. Peningkatan Wirausaha Baru 2. Pengembangan Usaha Mikro 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan PLUT KUMKM
	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	4. Koperasi Memenuhi Standar Kesehatan dan Ketentuan 5. Penilaian Koperasi Berdampak pada Peningkatan Produktivitas Koperasi 6. Meningkatkan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Aktif 7. Meningkatkan Kompetensi SDM Koperasi 8. Meningkatkan Produktivitas Usaha Koperasi

Sumber : Analisis Diskop UKM, 2025

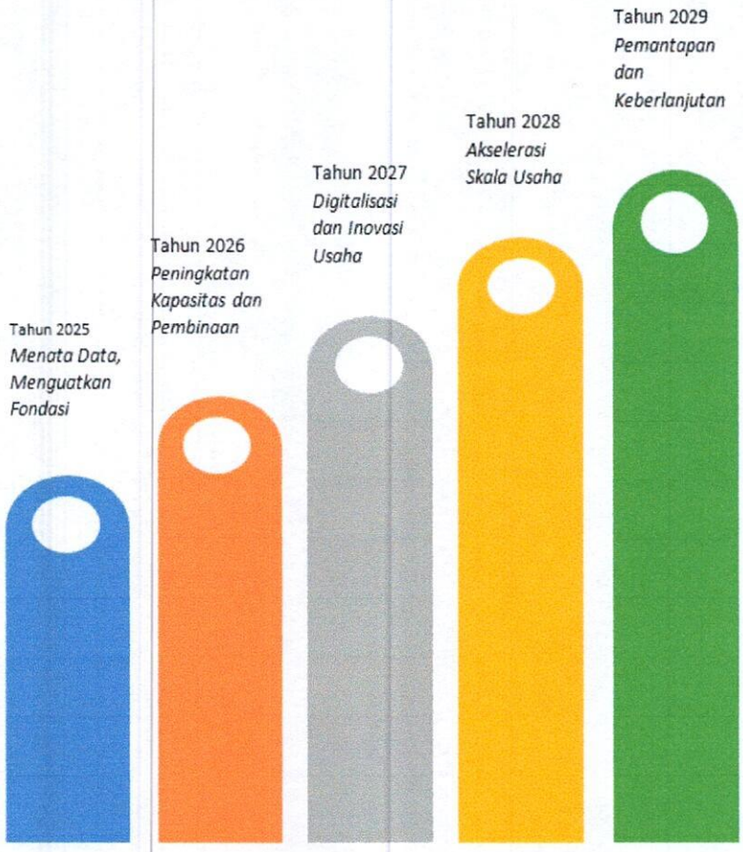
Tahapan pembangunan 5 tahun mencerminkan sebuah proses sistematis untuk mewujudkan visi pembangunan melalui langkah-langkah yang terencana, terukur, dan terarah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kabupaten Bandung. Hal tersebut menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Pentahapan dirancang untuk memberikan panduan yang lebih operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun

mendatang, sehingga tujuan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi daerah dapat dicapai secara optimal. Penahapan pembangunan ini diselaraskan dengan tema pembangunan dan pentahapan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029.

Pentahapan pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung periode 2025 - 2029 dapat digambarkan dengan tahapan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Pentahapan Pembangunan Renstra Tahun 2025-2029



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

1) Tahun 2025 : Menata Data, Menguatkan Fondasi

Pada tahun 2025, Dinas Koperasi dan UKM memprioritaskan penguatan data sebagai fondasi utama pengembangan usaha mikro dan koperasi. Kegiatan utama meliputi pemutakhiran, validasi, dan integrasi data usaha mikro dan koperasi agar akurat dan dapat dijadikan dasar kebijakan serta program pembinaan. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung baik teknologi informasi maupun sarana fisik diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembinaan usaha. Penguatan fondasi ini menjadi langkah awal yang krusial agar program peningkatan usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat dapat berjalan optimal dan terukur.

2) Tahun 2026 : Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan

Memasuki tahun kedua, fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM dan koperasi melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses pembiayaan dan legalitas usaha. Pembinaan kelembagaan koperasi difokuskan untuk meningkatkan kesehatan dan profesionalisme pengelolaan koperasi agar dapat berkontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Program sertifikasi dan pendampingan intensif menjadi strategi utama dalam mendukung usaha mikro agar naik kelas dan koperasi agar berdaya saing dan mandiri.

3) Tahun 2027 : Digitalisasi dan Inovasi Usaha

Pada tahun ketiga, fokus diarahkan untuk mendorong transformasi digital serta pengembangan inovasi usaha sebagai kunci meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi model bisnis menjadi prioritas agar pelaku usaha mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan membuka akses pasar yang lebih luas. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan usaha mikro yang naik kelas dan memperkuat kesehatan koperasi secara signifikan.

4) Tahun 2028 : Akselerasi Skala Usaha

Pada tahun keempat, difokuskan pada percepatan pengembangan skala usaha koperasi dan UMKM melalui perluasan pasar, standarisasi produk, serta peningkatan kualitas produksi. Dinas memfasilitasi akses pasar yang lebih luas baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan diperkuat untuk mendorong sinergi dalam memperbesar skala usaha sehingga meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi koperasi dan UMKM terhadap pembangunan daerah.

5) Tahun 2029 : Pemantapan dan Keberlanjutan

Pada tahun terakhir Renstra, fokus pada pemantapan hasil capaian dan perencanaan keberlanjutan pengembangan koperasi dan UMKM. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian indikator usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat, sekaligus mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan pengembangan koperasi dan UMKM yang adaptif dan berkelanjutan ke depan.

Tabel 3.3 Penahapan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan	Penahapan					
	Baseline (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mendorong pelatihan teknis dan manajerial berbasis kebutuhan pelaku usaha mikro 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pendampingan usaha mikro	• Updating database usaha mikro • Penyusunan modul pelatihan	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan manajemen usaha dan kewirausahaan • Pelatihan akuntansi dasar dan pengelolaan keuangan Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan manajemen usaha dan kewirausahaan • Pelatihan akuntansi dasar dan pengelolaan keuangan Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan manajemen usaha dan kewirausahaan • Pelatihan akuntansi dasar dan pengelolaan keuangan Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan manajemen usaha dan kewirausahaan • Pelatihan akuntansi dasar dan pengelolaan keuangan Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan manajemen usaha dan kewirausahaan • Pelatihan akuntansi dasar dan pengelolaan keuangan Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan
3. Peningkatan fasilitasi pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan 4. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan untuk penyediaan pembiayaan inklusif	• Identifikasi dan pemetaan lembaga keuangan • Kerja sama dengan koperasi/lembaga keuangan/BUMD	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Sosialisasi program pembiayaan usaha mikro Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan akses pembiayaan	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Sosialisasi program pembiayaan usaha mikro Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan akses pembiayaan	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Sosialisasi program pembiayaan usaha mikro Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan akses pembiayaan	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Sosialisasi program pembiayaan usaha mikro Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan akses pembiayaan	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Sosialisasi program pembiayaan usaha mikro Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pendampingan akses pembiayaan

Arah Kebijakan	Penahapan					
	Baseline (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Fasilitasi sertifikasi produk, pengemasan, dan standarisasi mutu 6. Penguatan ekosistem inovasi usaha mikro dan koperasi melalui inkubasi bisnis	• Updating data legalitas usaha mikro • Optimalisasi sarana dan prasarana PLUT KUMKM	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) • Pengenalan kemasan produk Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Fasilitasi sertifikasi halal, HaKI, dan kemasan produk • Pemetaan potensi produk unggulan • Inkubasi Bisnis	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) • Pengenalan kemasan produk Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Fasilitasi sertifikasi halal, HaKI, dan kemasan produk • Pemetaan potensi produk unggulan • Inkubasi Bisnis	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) • Pengenalan kemasan produk Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Fasilitasi sertifikasi halal, HaKI, dan kemasan produk • Pemetaan potensi produk unggulan • Inkubasi Bisnis	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) • Pengenalan kemasan produk Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Fasilitasi sertifikasi halal, HaKI, dan kemasan produk • Pemetaan potensi produk unggulan • Inkubasi Bisnis	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) • Pengenalan kemasan produk Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Fasilitasi sertifikasi halal, HaKI, dan kemasan produk • Pemetaan potensi produk unggulan • Inkubasi Bisnis
7. Pengembangan pasar khusus UMKM seperti galeri UMKM dan event promosi daerah 8. Penguatan promosi dan branding produk unggulan	• Identifikasi dan pemetaan jejaring kemitraan usaha mikro • Kerjasama kemitraan dengan Lembaga/ perusahaan/ buyer • Updating data usaha mikro yang bermitra	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan dasar pemasaran digital Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pelatihan strategi branding dan promosi • Kurasi produk	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan dasar pemasaran digital Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pelatihan strategi branding dan promosi • Kurasi produk	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan dasar pemasaran digital Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pelatihan strategi branding dan promosi • Kurasi produk	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan dasar pemasaran digital Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pelatihan strategi branding dan promosi • Kurasi produk	Pelaku Usaha Mikro Pemula: • Pelatihan dasar pemasaran digital Pelaku Usaha Mikro Lanjutan: • Pelatihan strategi branding dan promosi

Arah Kebijakan	Penahapan					
	Baseline (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		• Partisipasi dalam Pameran Nasional, Regional dan Lokal • *Business matching* dan Kemitraan • Fasilitasi produk pada gerai-gerai potensial	• Partisipasi dalam Pameran Nasional, Regional dan Lokal • *Business matching* dan Kemitraan • Fasilitasi produk pada gerai-gerai potensial	• Partisipasi dalam Pameran Nasional, Regional dan Lokal • *Business matching* dan Kemitraan • Fasilitasi produk pada gerai-gerai potensial	• Partisipasi dalam Pameran Nasional, Regional dan Lokal • *Business matching* dan Kemitraan • Fasilitasi produk pada gerai-gerai potensial	• Kurasi produk • Partisipasi dalam Pameran Nasional, Regional dan Lokal • *Business matching* dan Kemitraan • Fasilitasi produk pada gerai-gerai potensial
9. Peningkatan kompetensi pengurus dan pengawas koperasi 10. Penguatan tata Kelola kelembagaan koperasi 11. Penerapan digitalisasi koperasi	• Upadating Database Koperasi	Pra Koperasi/Kelompok Potensial: • Penyuluhan perkoperasian • Fasilitasi badan hukum koperasi Koperasi Baru : • Pelatihan Tata Kelola Koperasi • Pelatihan Penyusunan Laporan RAT • Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan RAT • Pendampingan	Pra Koperasi/Kelompok Potensial: • Penyuluhan perkoperasian • Fasilitasi badan hukum koperasi Koperasi Baru : • Pelatihan Tata Kelola Koperasi • Pelatihan Penyusunan Laporan RAT • Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan RAT • Pendampingan	Pra Koperasi/Kelompok Potensial: • Penyuluhan perkoperasian • Fasilitasi badan hukum koperasi Koperasi Baru : • Pelatihan Tata Kelola Koperasi • Pelatihan Penyusunan Laporan RAT • Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan RAT • Pendampingan	Pra Koperasi/Kelompok Potensial: • Penyuluhan perkoperasian • Fasilitasi badan hukum koperasi Koperasi Baru : • Pelatihan Tata Kelola Koperasi • Pelatihan Penyusunan Laporan RAT • Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan RAT • Pendampingan	Pra Koperasi/Kelompok Potensial: • Penyuluhan perkoperasian • Fasilitasi badan hukum koperasi Koperasi Baru : • Pelatihan Tata Kelola Koperasi • Pelatihan Penyusunan Laporan RAT • Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan RAT • Pendampingan

Arah Kebijakan	Penahapan					
	Baseline (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Koperasi Aktif : • Uji Kompetensi SDM Koperasi • Pelatihan Digitalisasi Koperasi • Pendampingan	Koperasi Aktif : • Uji Kompetensi SDM Koperasi • Pelatihan Digitalisasi Koperasi • Pendampingan	Koperasi Aktif : • Uji Kompetensi SDM Koperasi • Pelatihan Digitalisasi Koperasi • Pendampingan	Koperasi Aktif : • Uji Kompetensi SDM Koperasi • Pelatihan Digitalisasi Koperasi • Pendampingan	Koperasi Aktif : • Uji Kompetensi SDM Koperasi • Pelatihan Digitalisasi Koperasi • Pendampingan
12. Penguatan fungsi pengawasan koperasi	• Penyusunan Aplikasi Pengawasa Koperasi • Pemetaan Data Pengawasan Koperasi	• Penerapan SOM, SOP dan Peraturan Khusus • Pemahaman Sistem Pengawasan dan Audit Eksternal • Pengawasan Penerapan Kepatuhan dan Kelembagaan Koperasi • Pemeriksaaan Kesehatan Koperasi • Pemeringkatan Koperasi	• Penerapan SOM, SOP dan Peraturan Khusus • Pemahaman Sistem Pengawasan dan Audit Eksternal • Pengawasan Penerapan Kepatuhan dan Kelembagaan Koperasi • Pemeriksaaan Kesehatan Koperasi • Pemeringkatan Koperasi	• Penerapan SOM, SOP dan Peraturan Khusus • Pemahaman Sistem Pengawasan dan Audit Eksternal • Pengawasan Penerapan Kepatuhan dan Kelembagaan Koperasi • Pemeriksaaan Kesehatan Koperasi • Pemeringkatan Koperasi	• Penerapan SOM, SOP dan Peraturan Khusus • Pemahaman Sistem Pengawasan dan Audit Eksternal • Pengawasan Penerapan Kepatuhan dan Kelembagaan Koperasi • Pemeriksaaan Kesehatan Koperasi • Pemeringkatan Koperasi	• Penerapan SOM, SOP dan Peraturan Khusus • Pemahaman Sistem Pengawasan dan Audit Eksternal • Pengawasan Penerapan Kepatuhan dan Kelembagaan Koperasi • Pemeriksaaan Kesehatan Koperasi • Pemeringkatan Koperasi
13. Penguatan ekosistem inovasi usaha mikro dan	• Penguatan koperasi berbasis desa/ kelurahan	• Inkubasi Bisnis Koperasi • Pendampingan	• Inkubasi Bisnis Koperasi • Pendampingan	• Inkubasi Bisnis Koperasi • Pendampingan	• Inkubasi Bisnis Koperasi • Pendampingan	• Inkubasi Bisnis Koperasi • Pendampingan

Arah Kebijakan	Penahapan					
	Baseline (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
koperasi melalui inkubasi bisnis 14. Fasilitasi pembentukan koperasi sektor strategis	• klasterisasi sektor koperasi potensial					
15. Mendorong kemitraan strategis koperasi dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga keuangan	• Identifikasi dan pemetaan jejaring kemitraan usaha koperasi • Kerjasama kemitraan dengan Lembaga/ perusahaan/BUMD • Updating data koperasi yang bermitra	• Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan koperasi • Fasilitasi kemitraan/ jaringan Kerjasama usaha koperasi • Pameran tematik koperasi	• Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan koperasi • Fasilitasi kemitraan/ jaringan Kerjasama usaha koperasi • Pameran tematik koperasi	• Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan koperasi • Fasilitasi kemitraan/ jaringan Kerjasama usaha koperasi • Pameran tematik koperasi	• Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan koperasi • Fasilitasi kemitraan/ jaringan Kerjasama usaha koperasi • Pameran tematik koperasi	• Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan koperasi • Fasilitasi kemitraan/ jaringan Kerjasama usaha koperasi • Pameran tematik koperasi

Sumber : Analisis Diskop UKM, 2025

3.3 Penyajian Lokus Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Penentuan lokus pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 mempertimbangkan data sebaran koperasi dan usaha mikro berdasarkan hasil pemetaan tahun 2024. Lokus ditentukan berdasarkan sebaran jumlah koperasi, koperasi berkualitas, tingkat kesehatan koperasi, aktivitas koperasi (RAT), serta sebaran usaha mikro.

1) Wilayah Prioritas Berdasarkan Sebaran Jumlah Koperasi

Wilayah selatan Kabupaten Bandung, terutama Kecamatan Pangalengan, Soreang, dan Baleendah, menjadi wilayah dengan jumlah koperasi terbanyak. Kecamatan Ciparay, Banjaran, dan Pacet juga termasuk wilayah dengan konsentrasi koperasi sedang. Sebaliknya, wilayah utara dan timur seperti Cimenyan, Cilengkrang, Nagreg, dan Ibun memiliki jumlah koperasi paling sedikit. Wilayah dengan konsentrasi koperasi tinggi menjadi prioritas pembinaan lanjutan, sedangkan wilayah dengan jumlah koperasi rendah menjadi lokus penguatan dan perluasan kelembagaan koperasi.

2) Wilayah Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Koperasi

Pemeriksaan kesehatan koperasi pada tahun 2024 memperlihatkan bahwa koperasi yang tergolong sehat dan cukup sehat lebih banyak ditemukan di bagian utara. Sementara wilayah selatan menunjukkan intensitas pemeriksaan dan kualitas yang lebih rendah. Oleh karena itu, wilayah selatan menjadi lokus prioritas untuk pemeriksaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.

3) Wilayah Pembinaan Koperasi RAT

Kecamatan Margahayu dan Baleendah menjadi kecamatan dengan koperasi RAT terbanyak. Namun terdapat kecamatan seperti Paseh dan Kertasari yang belum memiliki koperasi RAT. Wilayah ini menjadi fokus pembinaan agar koperasi menjalankan prinsip-prinsip koperasi melalui pelaksanaan RAT secara rutin.

4) Wilayah Prioritas Usaha Mikro

Sebaran usaha mikro tahun 2024 menunjukkan konsentrasi tinggi di wilayah utara dan timur seperti Cileunyi, Rancaekek, dan Majalaya, karena kepadatan penduduk dan aksesibilitas wilayah. Sementara wilayah selatan seperti Rancabali dan Kertasari memiliki jumlah usaha mikro yang rendah. Wilayah padat usaha mikro akan difokuskan pada

program peningkatan daya saing dan naik kelas, sementara wilayah dengan jumlah sedikit menjadi lokus pengembangan wirausaha baru. Dengan pendekatan berbasis data sebaran aktual, penyusunan lokus Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung 2025 - 2029 diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan koperasi dan usaha mikro di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

5) Peningkatan Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung tematik Peningkatan Ketahanan Pangan sebagaimana arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, ditetapkan beberapa indikasi aktivitas yang disinergikan dengan lokus prioritas. Pertama, melalui penumbuhan unit-unit pengolahan dan pengemasan hasil produk pangan serta peningkatan kualitas produk, yang diarahkan pada sejumlah desa di Kabupaten Bandung, seperti Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran, Desa Cikembang, Cihawuk dan Neglawangi Kecamatan Kertasari, Desa Wangisagara, Sukamaju, Padaulun dan Padamulya Kecamatan Majalaya, Desa Bojongsalam Kecamatan Rancaekek, Desa Malakasari Kecamatan Baleendah, Desa Margamulya, Margamukti dan Pangalengan Kecamatan Pangalengan, Desa Karyalaksana Kecamatan Ibun, Desa Cangkuang Kulon dan Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot, Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay, Desa Baros Kecamatan Arjasari, Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin, Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang. Pada wilayah tersebut, dukungan kegiatan dilakukan melalui pelatihan *e-commerce* dan kemasan UMKM sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal. Kedua, dalam mendukung program prioritas nasional, dilakukan penguatan kerja sama produk petani dengan pusat distribusi produk pangan di wilayah. Lokus kegiatan meliputi Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh, Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu, Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg, Desa Tanjungsari, Neglasari dan Mekarjaya Kecamatan Banjaran, Desa Cimekar dan Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Desa Neglawangi dan Cikembang Kecamatan Kertasari, Desa Mekarjaya dan Sukarame Kecamatan Pacet, Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikancung, Desa Kopo dan Cibodas Kecamatan Kutawaringin, Desa Andir Kecamatan Baleendah, Desa Cipaku Kecamatan Paseh, Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka, Desa Ciluncat Kecamatan Cikancung, Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu hingga

Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang. Dukungan kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi kemitraan bagi UMKM agar mampu membangun jejaring pemasaran yang lebih luas dan berkelanjutan. Ketiga, penguatan kelembagaan koperasi juga menjadi perhatian melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Produsen Pertanian sebagai agregator produk pertanian, termasuk untuk mendukung MBG. Lokus utama diarahkan di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari. Dukungan kegiatan yang dilaksanakan mencakup pendampingan koperasi, pendampingan tematik perkoperasian, pelatihan pelaksanaan dan pelaporan RAT, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.

Dengan demikian, sinergi antara indikasi aktivitas dan lokus prioritas ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, sekaligus memperkuat peran UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung.

6) Wilayah Prioritas Kawasan ekonomi Terpadu

Dalam rangka mewujudkan Kawasan Ekonomi Terpadu sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, ditetapkan berbagai kegiatan strategis yang disinergikan dengan lokus prioritas pengembangan sektor UMKM dan penguatan kelembagaan koperasi. Pertama, penguatan pengembangan sektor UMKM difokuskan di beberapa wilayah, antara lain Desa Cingcin Kecamatan Soreang, Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang, Desa Sayati dan Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu. Di Desa Cingcin Kecamatan Soreang, kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas produk dari kemasan UMKM dan pemasaran digital, serta fasilitasi kemitraan bagi UMKM. Selanjutnya, di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang dilakukan peningkatan kualitas dan standardisasi produk melalui penguatan sentra UMKM kuliner (telur asin), peningkatan kapasitas SDM manajemen usaha, fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan industri besar melalui pemetaan koridor UMKM, serta pelatihan *e-commerce* dan kemasan UMKM. Adapun di Desa Sayati Kecamatan Margahayu, dukungan diarahkan untuk memperkuat jejaring usaha melalui pelatihan *e-commerce* dan kemasan UMKM, sedangkan di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu difokuskan pada inkubasi UMKM topi dan kuliner (kue bangket) serta pengembangan pemasaran berbasis digital. Kedua, penguatan kelembagaan dan usaha koperasi diarahkan pada

lokus Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi. Kegiatan yang dilakukan mencakup pendampingan koperasi, pendampingan tematik perkoperasian, pelatihan pelaksanaan dan pelaporan RAT, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.

Melalui integrasi antara aktivitas dan lokus prioritas ini, pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu di Kabupaten Bandung diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk UMKM, memperluas akses pasar digital, membangun kemitraan dengan industri besar, sekaligus memperkuat kelembagaan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Tabel 3.4 Penyajian Lokus PD

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp4,632,376,878	Rp2,696,160,000	Rp4,696,160,000	Rp696,160,000	Rp 696,160,000	31 Kec
2	Program Pengembangan UMKM	Rp1,696,792,688	Rp1,200,815,700	Rp1,250,815,700	Rp1,250,815,700	Rp1,250,815,700	31 Kec
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 610,798,802	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000	31 Kec
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 265,596,901	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	31 Kec
5	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	31 Kec
6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp 143,404,500	Rp 165,000,000	Rp 165,000,000	Rp 165,000,000	Rp 165,000,000	31 Kec
7	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp 893,088,774	Rp 845,520,000	Rp 845,520,000	Rp 845,520,000	Rp 845,520,000	31 Kec

Sumber: Analisis Diskop UKM, 2025

3.4 Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan tahap pembangunan tahunan yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan, diperlukan langkah – langkah konkret yang terukur dan berorientasi pada hasil. Langkah – langkah ini

dirancang sebagai bentuk implementasi strategi yang telah disusun, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah – langkah ini tidak hanya berfungsi untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Adapun arah kebijakan yang akan dilakukan selama periode lima tahun mendatang untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung sebagai berikut :

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	MISI 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	1. Penguatan Pemanfaatan Produk Lokal	a. Pengembangan pasar khusus UMKM seperti galeri UMKM dan event promosi daerah b. Penguatan promosi dan branding produk unggulan	
		2. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	c. Penguatan ekosistem inovasi usaha mikro dan koperasi melalui inkubasi bisnis	
		3. Pengembangan pusat kompetensi tenaga kerja dan kewirausahaan terintegrasi yang berbasis digital, teknologi dan layanan keuangan	d. Fasilitasi sertifikasi produk, pengemasan, dan standarisasi mutu e. Mendorong pelatihan teknis dan manajerial berbasis kebutuhan pelaku usaha mikro f. Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pendampingan usaha mikro g. Peningkatan kompetensi pengurus dan pengawas koperasi h. Penguatan tata Kelola kelembagaan koperasi i. Penerapan digitalisasi koperasi j. Penguatan fungsi pengawasan koperasi	
		4. Mendorong peningkatan upah, insentif untuk UMKM, dan pengembangan sektor ekonomi inklusif agar pendapatan masyarakat naik	k. Peningkatan fasilitasi pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan l. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan untuk penyediaan pembiayaan inklusif m. Mendorong kemitraan strategis koperasi dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga keuangan n. Fasilitasi pembentukan koperasi sektor strategis	
		5. Pengembangan Koperasi Desa dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat desa	o. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih p. Penguatan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih menuju kesejahteraan desa q. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal melalui kepemilikan dan pengelolaan koperasi r. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan formal	

Sumber : Analisis Diskop UKM, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, setiap program Perangkat Daerah harus dirancang secara terukur melalui penetapan indikator, target, dan pagu indikatif. Ketiga elemen ini menjadi komponen utama dalam memastikan program yang dilaksanakan benar-benar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator program digunakan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Indikator tersebut disusun secara kuantitatif maupun kualitatif, agar mampu menggambarkan capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program secara objektif. Dengan adanya indikator yang jelas, evaluasi terhadap keberhasilan program dapat dilakukan secara berkala dan sistematis. Target program menggambarkan tingkat pencapaian yang ingin diraih dalam kurun waktu 2025 - 2029 dengan akhir tahun perencanaan pada tahun 2030 sebagai masa transisi pemerintahan, dan merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung serta mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM, diperlukan penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang sistematis dan terintegrasi. Program yang dirancang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Bidang Koperasi dan UMKM. Selain itu, setiap program juga perlu disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya yang tersedia, serta dapat diukur capaian dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Indikasi program yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan merinci indikator, target, dan pagu indikatif, Dinas Koperasi dan UKM memiliki dasar yang kuat dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program yang telah ditetapkan. Penjabaran ini juga bertujuan

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Dinas Koperasi dan UKM

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pembangunan perekonomian daerah yang inklusif	Meningkatkan kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Perekonomian Daerah				Rasio Kewirausahaan Daerah		Jumlah Usaha Mikro ---------- x 100% Jumlah angkatan kerja
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		Volume Usaha Koperasi ---------- x 100% PDRB ADHB
		Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro			Proporsi Jumlah Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro ber NIB ---------- x 100% Jumlah UMKM ber NIB
			Meningkatnya Wirausaha Baru		Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha mikro (UMKM)	(Jumlah Usaha Mikro Tahun N - Jumlah Usaha Mikro Tahun N-1) ---------- x 100% Jumlah Usaha Mikro Tahun N-1
				Meningkatnya Kapasitas SDM Calon Wirausaha	Persentase peningkatan calon wirausaha yang terbina	Pemberdayaan Usaha yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Calon Wirausaha yang mengikuti Kegiatan Pelatihan ---------- x 100% Jumlah Wirausaha yang terbina
				Terfasilitasinya usaha mikro dalam proses pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencetakan Keuangan Usaha mikro dan Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan keiwrausahaan	jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan keiwrausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan
				Meningkatnya Legalitas Usaha Calon Wirausaha	Persentase calon wirausaha yang memiliki jaminan produk	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha mikro (UMKM)	Jumlah Calon wirausaha yang terbina untuk memiliki Jaminan Produk ---------- x 100% Jumlah Wirausaha yang terbina
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan perizinan	Fasilitasi Kemudahaan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan perizinan
				Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi
				Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi	Fasilitasi Sertifikasi dan standarisasi udaha mikro	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terbatas	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terbatas

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan SInkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan ushaa mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Peangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan ushaa mikro
				Meningkatnya Permodalan Calon Wirausaha	Persentase calon wirausaha yang modalnya meningkat	Pemberdayaan Usaha yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Calon Wirausaha yang modalnya meningkat ---------- x 100% Jumlah Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro
				Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/ atau bantuan bentuk lain	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Calon Wirausaha yang bermitra	Proporsi Calon Wirausaha yang menjalin kemitraan	Pemberdayaan Usaha yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang menjalin Kemitraan ---------- x 100% Jumlah Wirausaha yang terbina
				Terfasilitasinya Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksnaakan kemitraan usaha mikro	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksnaakan kemitraan usaha mikro
				Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi melalui gerai gerai-gerai UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
				Terfasilitasinya Usaha Mikrodalam proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi	Fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi
			Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro		Persentase Peningkatan Omset Pelaku UMKM	Program Pengembangan UMKM	(Rata-rata Omset UMKM yang difasilitasi DiskopUKM tahun N - Rata-rata Omset UMKM yang difasilitasi DiskopUKM tahun N-1) ---------- x 100% Rata-rata Omset UMKM yang difasilitasi DiskopUKM tahun N-1

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase peningkatan hasil transaksi Usaha Mikro	Pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi skala kecil	Jumlah Peningkatan hasil Transaksi Calon Wirausaha ---------- x 100% Jumlah Wirausaha yang terbina
				Terfasilitasinya usaha mikro dalam inkubator wirausaha	Jumlah inkubator yang terfasilitasi	Fasilitasi inkubator usaha mikro	Jumlah inkubator yang terfasilitasi
				Terfasilitasinya Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi	Produksi dan Pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan PLUT KUMKM		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pengembangan UMKM	Hasil Penilaian SKM
				Pelayanan PLUT KUMKM Memenuhi Standar	Persentase Permohonan Pelayanan PLUT yang terlayani sesuai Standar	Pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi skala kecil	Jumlah Pemohonan Pelayanan PLUT yang terlayani sesuai Standar ---------- x 100% Jumlah Pemohon Pelayanan PLUT
				Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi
		Meningkatnya koperasi yang berkualitas			Persentase Koperasi Sehat		Jumlah Koperasi Sehat ---------- x 100% Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Koperasi Memenuhi Standar Kesehatan dan Ketentuan		Persentase Koperasi memenuhi standar dan ketentuan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksanaan Koperasi	Jumlah koperasi yang memenuhi standar dan ketentuan koperasi ---------- x 100% koperasi aktif
				Meningkatnya pengawasan koperasi	Persentase Koperasi yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah Koperasi yang Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Kepatuhan ---------- x 100% Jumlah Koperasi yang Diperiksa Kepatuhannya
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Penguatan Tata Kelola kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotannya daerah kabupaten/ kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/ kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
			Penilaian Koperasi Berdampak pada Peningkatan		Persentase Rekomendasi Hasil Penilaian yang Ditindaklanjuti	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang Menindaklanjuti Rekomendasi ---------- x 100% Jumlah Koperasi yang Diperiksa Kesehatannya

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Produktivitas Koperasi	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kesehatan Koperasi	Persentase Penilaian Koperasi yang menghasilkan rekomendasi Perbaikan Kesehatan Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten/ kota	Jumlah Koperasi yang Diberikan Rekomendasi ---------- x 100% Jumlah Koperasi yang Diperiksa Kesehatannya
				Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan
			Meningkatnya koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam		Persentase Koperasi yang memilki izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam hasil Pemeriksaan Kesehatan ---------- x 100% Jumlah KSP/USP yang melaksanakan RAT
				Meningkatnya Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang berizin	Persentase Koperasi yang menerbitkan izin	Penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam ---------- x 100% Jumlah KSP/USP yang Diperiksa Kesehatannya

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya pemenuhan usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi SImpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota
			Meningkatnya Kompetensi SDM Koperasi		Persentase SDM Koperasi yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi yang memiliki Sertifikat Kompetensi ---------- x 100% Jumlah Pengurus Koperasi RAT
				Meningkatkan Pembinaan SDM Koperasi	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang terbina	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti Sosialisasi Uji Kompetensi ---------- x 100% Jumlah Pengurus RAT
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Produktivitas Usaha Koperasi		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	((Volume Usaha Koperasi Tahun ke-N - Volume Usaha Koperasi Tahun ke (N-1)) ---------- x 100% Volume Usaha Koperasi Tahun ke (N-1))
				Meningkatnya Koperasi Baru	Persentase peningkatan Koperasi baru	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Baru ---------- x 100% Jumlah Seluruh Koperasi
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/ atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembagnan Ekonomi	Pembinaan dan/ atau Pendampingan yang dilaksanakan
				Meningkatnya Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	(Koperasi yang melaksanakan RAT Tahun ke-N - Koperasi yang melaksanakan RAT Tahun ke (N-1)) ---------- x 100% Koperasi yang melaksanakan RAT Tahun ke (N-1)

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Fasiltasi Pelaporan Status Kelembagaan dan/ atau perkembangan usaha koperasi yang keanggotannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelaporannya	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelaporannya
				Meningkatnya Akses Permodalan Koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki akses permodalan	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi yang mendapatkan akses permodalan ---------- x 100% Koperasi yang difasilitasi sosialisasi akses permodalan
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Permodalannya
				Meningkatnya Pemasaran Koperasi	Perputaran Aset Koperasi yang mengikuti Program Pengembangan Usaha Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Volume Usaha Koperasi yang mengikuti Inkubasi ---------- x 100% Aset Koperasi yang mengikuti Inkubasi
				Fasilitasi Kemitraan Antar Koperasi maupun antara Koperasi dengan Badan Hukum Lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi kemitraannya

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Peningkatan Iklim usaha Koperasi Melalui Aspek Kelembagaan, Produksi, Pemasaran, keuangan, dan Inovasi teknologi bagi koperasi dengan keanggotaan daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah Kabupaten/ Kota
			Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian IRB PD
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah		Nilai Maturitas Manajemen Risiko PD
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP PD
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Keuangan Dinas Diskop UKM	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu ---------- x 100% Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administasi Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang diselesaikan ---------- x 100% Jumlah Dokumen Administrasi BMD
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Diskop UKM	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian tepat Waktu ---------- x 100% Dokumen Administrasi Kepegawaian

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tersedianya Operasional Kantor Diskop UKM	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang diselesaikan ---------- x 100% Jumlah Dokumen Administrasi Umkm PD
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang diselesaikan ---------- x 100% Jumlah Laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan BMD ---------- x 100% Jumlah Pengadaan BMD
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik ---------- x 100% Jumlah BMD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sumber : Analisis Diskop UKM, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memilki izin usaha simpan pinjam	N/A	18.77%	Rp 35,000,000.00	17.73%	Rp 35,000,000.00	18.39%	Rp 35,000,000.00	19.02%	Rp 35,000,000.00	19.57%	Rp 35,000,000.00	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang menerbitkan izin	N/A	73.68%	Rp 35,000,000.00	75.00%	Rp 35,000,000.00	76.19%	Rp 35,000,000.00	77.27%	Rp 35,000,000.00	78.26%	Rp 35,000,000.00	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	Rp 35,000,000.00	20 Unit Usaha	Rp 35,000,000.00	20 Unit Usaha	Rp 35,000,000.00	20 Unit Usaha	Rp 35,000,000.00	20 Unit Usaha	Rp 35,000,000.00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi memenuhi standar dan ketentuan Koperasi	N/A	2.70%	Rp 610,798,802.00	2.88%	Rp 600,000,000.00	3.05%	Rp 600,000,000.00	3.21%	Rp 600,000,000.00	3.36%	Rp 600,000,000.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan	N/A	26.40%	Rp 610,798,802.00	27.69%	Rp 600,000,000.00	28.89%	Rp 600,000,000.00	30.00%	Rp 600,000,000.00	31.03%	Rp 600,000,000.00	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	134 Unit Usaha	194 Unit usaha	Rp 345,292,900.00	194 Unit usaha	Rp 300,000,000.00	194 Unit usaha	Rp 300,000,000.00	194 Unit usaha	Rp 300,000,000.00	194 Unit usaha	Rp 300,000,000.00	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	186 Unit Usaha	130 Unit Usaha	Rp 265,505,902.00	130 Unit Usaha	Rp 300,000,000.00	130 Unit Usaha	Rp 300,000,000.00	130 Unit Usaha	Rp 300,000,000.00	130 Unit Usaha	Rp 300,000,000.00	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Rekomendasi Hasil Penilaian yang Ditindaklanjuti	N/A	17.89%	Rp 265,596,901.00	19.00%	Rp 300,000,000.00	20.00%	Rp 300,000,000.00	20.91%	Rp 300,000,000.00	21.74%	Rp 300,000,000.00	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase Penilaian Koperasi yang menghasilkan rekomendasi Perbaikan Kesehatan Koperasi	N/A	100%	Rp 265,596,901.00	100%	Rp 300,000,000.00	100%	Rp 300,000,000.00	100%	Rp 300,000,000.00	100%	Rp 300,000,000.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	116 Unit Usaha	120 Unit Usaha	Rp 265,596,901.00	120 Unit Usaha	Rp 300,000,000.00	120 Unit Usaha	Rp 300,000,000.00	120 Unit Usaha	Rp 300,000,000.00	120 Unit Usaha	Rp 300,000,000.00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Bersertifikat Kompetensi	N/A	6.43%	Rp 143,404,500.00	7.26%	Rp 165,000,000.00	8.63%	Rp 165,000,000.00	9.85%	Rp 165,000,000.00	10.92%	Rp 165,000,000.00	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang terbina	N/A	6.43%	Rp 143,404,500.00	7.26%	Rp 165,000,000.00	8.63%	Rp 165,000,000.00	9.85%	Rp 165,000,000.00	10.92%	Rp 165,000,000.00	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	96 Unit Usaha	45 Orang	Rp 143,404,500.00	45 Orang	Rp 165,000,000.00	45 Orang	Rp 165,000,000.00	45 Orang	Rp 165,000,000.00	45 Orang	Rp 165,000,000.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	2.42%	2.04%	Rp 893,088,774.00	2.14%	Rp 845,520,000.00	2.17%	Rp 845,520,000.00	2.21%	Rp 845,520,000.00	2.25%	Rp 845,520,000.00	S.2.1

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif												Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)
PERLINDUNGAN KOPERASI															
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase peningkatan Koperasi baru - Persentase Pertumbuhan Koperasi yang melaksanakan RAT - Persentase Koperasi yang memiliki akses permodalan - Perputaran Aset Koperasi yang mengikuti Program Pengembangan Usaha Koperasi	N/A	- 15.63% - 38.02% - 12.00% - 1.07	Rp 893,088,774.00	- 17.11% - 13.77% - 16.00% - 1.10	Rp 845,520,000.00	- 18.88% - 2.91% - 20.00% - 1.13	Rp 845,520,000.00	- 20.59% - 3.53% - 24.00% - 1.16	Rp 845,520,000.00	- 22.22% - 4.09% - 28.00% - 1.20	Rp 845,520,000.00			
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	39 Kelompok Masyarakat	18	Kelompok Masyarakat Rp 172,966,800.00	17	Kelompok Masyarakat Rp 100,000,000.00	17	Kelompok Masyarakat Rp 100,000,000.00	17	Kelompok Masyarakat Rp 100,000,000.00	17	Kelompok Masyarakat Rp 100,000,000.00			
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	25 Unit Usaha	20	Unit Usaha Rp 308,235,000.00	20	Unit Usaha Rp 300,000,000.00	20	Unit Usaha Rp 300,000,000.00	20	Unit Usaha Rp 300,000,000.00	20	Unit Usaha Rp 300,000,000.00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif														Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	3 Unit Usaha	25	Unit Usaha	Rp 45,520,000.00	25	Unit Usaha	Rp 45,520,000.00	25	Unit Usaha	Rp 45,520,000.00	25	Unit Usaha	Rp 45,520,000.00	25	Unit Usaha	Rp 45,520,000.00	
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	254 Unit Usaha	90	Unit Usaha	Rp 124,680,000.00	90	Unit Usaha	Rp 150,000,000.00	90	Unit Usaha	Rp 150,000,000.00	90	Unit Usaha	Rp 150,000,000.00	90	Unit Usaha	Rp 150,000,000.00	
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	13 Unit Usaha	100	Unit Usaha	Rp 241,686,974.00	100	Unit Usaha	Rp 250,000,000.00	100	Unit Usaha	Rp 250,000,000.00	100	Unit Usaha	Rp 250,000,000.00	100	Unit Usaha	Rp 250,000,000.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	7.06%	14.39%		Rp 4,632,376,878.00	15.59%		Rp 2,696,160,000.00	16.65%		Rp 4,696,160,000.00	17.57%		Rp 696,160,000.00	18.37%		Rp 696,160,000.00	S.2.1 S.2.3 S.1.4
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	- Persentase peningkatan calon wirausaha yang terbina - Persentase calon wirausaha yang memiliki jaminan produk - Persentase calon wirausaha yang modalnya meningkat	N/A	- 13.65% - 11.14% - 12.62% - 5.57%		Rp 4,632,376,878.00	- 14.58% - 13.02% - 12.70% - 6.25%		Rp 2,696,160,000.00	- 15.29% - 14.56% - 12.79% - 6.80%		Rp 4,696,160,000.00	- 15.91% - 15.91% - 13.12% - 7.27%		Rp 696,160,000.00	- 16.67% - 17.32% - 13.49% - 7.79%		Rp 696,160,000.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif															Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030			
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Para Pemangku Kepentingan	- Proporsi Calon Wirausaha yang menjalin kemitraan																	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	292 Unit Usaha	392	Unit Usaha	Rp 388,732,329.00	100	Unit Usaha	Rp 75,000,000.00	100	Unit Usaha	Rp 75,000,000.00	100	Unit Usaha	Rp 75,000,000.00	100	Unit Usaha	Rp 75,000,000.00	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	150 Unit Usaha	250	Unit Usaha	Rp 144,309,000.00	50	Unit Usaha	Rp 35,000,000.00	50	Unit Usaha	Rp 35,000,000.00	50	Unit Usaha	Rp 35,000,000.00	50	Unit Usaha	Rp 35,000,000.00	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	775 Unit Usaha	250	Unit Usaha	Rp 179,700,000.00	100 0	Unit Usaha	Rp 220,000,000.00	1000	Unit Usaha	Rp 220,000,000.00	100 0	Unit Usaha	Rp 220,000,000.00	1000	Unit Usaha	Rp 220,000,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	N/A	20	Orang	Rp 40,000,000.00	20	Orang	Rp 7,000,000.00	20	Orang	Rp 7,000,000.00	20	Orang	Rp 7,000,000.00	20	Orang	Rp 7,000,000.00	
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	169	Unit Usaha	Rp 240,274,000.00	50	Unit Usaha	Rp 55,000,000.00	50	Unit Usaha	Rp 55,000,000.00	50	Unit Usaha	Rp 55,000,000.00	50	Unit Usaha	Rp 55,000,000.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif														Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil																		
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	106 66	Unit Usaha	Rp 2,590,000,000.00	100 08	Unit Usaha	Rp 2,020,000,000.00	2000 8	Unit Usaha	Rp 4,020,000,000.00	8	Unit Usaha	Rp 20,000,000.00	8	Unit Usaha	Rp 20,000,000.00	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	200 Unit Usaha	100	Unit Usaha	Rp 140,430,000.00	50	Unit Usaha	Rp 60,000,000.00	50	Unit Usaha	Rp 60,000,000.00	50	Unit Usaha	Rp 60,000,000.00	50	Unit Usaha	Rp 60,000,000.00	
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	91 Unit Usaha	100	Unit Usaha	Rp 504,947,500.00	30	Unit Usaha	Rp 100,000,000.00	30	Unit Usaha	Rp 100,000,000.00	30	Unit Usaha	Rp 100,000,000.00	30	Unit Usaha	Rp 100,000,000.00	
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	N/A	0	Unit Usaha	Rp -	100	Unit Usaha	Rp 24,160,000.00	100	Unit Usaha	Rp 24,160,000.00	100	Unit Usaha	Rp 24,160,000.00	100	Unit Usaha	Rp 24,160,000.00	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	993 Unit Usaha	620	Unit Usaha	Rp 77,000,000.00	500	Unit Usaha	Rp 50,000,000.00	500	Unit Usaha	Rp 50,000,000.00	500	Unit Usaha	Rp 50,000,000.00	500	Unit Usaha	Rp 50,000,000.00	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	546 Orang	350	Orang	Rp 326,984,049.00	105	Orang	Rp 50,000,000.00	105	Orang	Rp 50,000,000.00	105	Orang	Rp 50,000,000.00	105	Orang	Rp 50,000,000.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif												Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027		Tahun 2028			Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target		Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	- Persentase Peningkatan Omset Pelaku UMKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	-12.90% - 87.67		Rp 1,696,792,688.00	-13.70% - 88.17	Rp 1,200,815,700.00	-14.60% - 88.67		Rp 1,250,815,700.00	-15.60% - 89.17	Rp 1,250,815,700.00	-16.70% - 89.67	Rp 1,250,815,700.00	S.2.1 S.2.3
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	- Persentase peningkatan hasil transaksi Usaha Mikro - Persentase Permohonan Pelayanan PLUT yang terlayani sesuai Standar	N/A	- 13.93% - 100.00%		Rp 1,696,792,688.00	- 15.36% - 100.00%	Rp 1,200,815,700.00	-16.50% - 100.00%		Rp 1,250,815,700.00	- 18.64% - 100.00%	Rp 1,250,815,700.00	- 20.78% - 100.00%	Rp 1,250,815,700.00	
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	N/A	1400	Lembaga	Rp 728,383,389.00	1400	Lembaga Rp 810,867,800.00	1400	Lembaga	Rp 810,867,800.00	1400	Lembaga Rp 810,867,800.00	1400	Lembaga Rp 810,867,800.00	
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	80 Unit Usaha	15	Unit Usaha	Rp 150,000,000.00	15	Unit Usaha Rp 100,000,000.00	15	Unit Usaha	Rp 150,000,000.00	15	Unit Usaha Rp 150,000,000.00	15	Unit Usaha Rp 150,000,000.00	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1367 Unit Usaha	293	Unit Usaha	Rp 818,409,299.00	150	Unit Usaha Rp 289,947,900.00	150	Unit Usaha	Rp 289,947,900.00	150	Unit Usaha Rp 289,947,900.00	150	Unit Usaha Rp 289,947,900.00	
TOTAL ANGGARAN BIDANG					Rp 8,277,058,543.00		Rp 5,842,495,700.00			Rp 7,892,495,700.00		Rp 3,892,495,700.00		Rp 3,892,495,700.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	- Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Manajemen	- 85.20 - 53.62	- 85.50 - 56.00		Rp 13,224,887,940.00	- 85.60 - 57.00	Rp 13,789,748,218.00	- 85.70 - 58.00		Rp 16,739,748,218.00	- 85.80 - 59.00	Rp 13,739,748,218.00	- 85.90 - 60.00	Rp 13,739,748,218.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif														Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Resiko Perangkat Daerah																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	N/A	85.00		Rp 216,709,900.00	85.20		Rp 230,597,900.00	85.50		Rp 230,597,900.00	85.75		Rp 230,597,900.00	86.00		Rp 301,635,200.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4	Dokumen	Rp 97,502,000.00	4	Dokumen	Rp 111,390,000.00	4	Dokumen	Rp 111,390,000.00	4	Dokumen	Rp 111,390,000.00	5	Dokumen	Rp 182,427,300.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1	Dokumen	Rp 8,760,900.00	1	Dokumen	Rp 8,760,900.00	1	Dokumen	Rp 8,760,900.00	1	Dokumen	Rp 8,760,900.00	1	Dokumen	Rp 8,760,900.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	2	Dokumen	Rp 9,680,200.00	2	Dokumen	Rp 9,680,200.00	2	Dokumen	Rp 9,680,200.00	2	Dokumen	Rp 9,680,200.00	2	Dokumen	Rp 9,680,200.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	Rp 1,193,100.00	1	Dokumen	Rp 1,193,100.00	1	Dokumen	Rp 1,193,100.00	1	Dokumen	Rp 1,193,100.00	1	Dokumen	Rp 1,193,100.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Dokumen	2	Dokumen	Rp 1,715,200.00	2	Dokumen	Rp 1,715,200.00	2	Dokumen	Rp 1,715,200.00	2	Dokumen	Rp 1,715,200.00	2	Dokumen	Rp 1,715,200.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif														Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD																	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7	Laporan	Rp 8,766,000.00	7	Laporan	Rp 8,766,000.00	7	Laporan	Rp 8,766,000.00	7	Laporan	Rp 8,766,000.00	7	Laporan	Rp 8,766,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	12	Laporan	Rp 7,679,200.00	12	Laporan	Rp 7,679,200.00	12	Laporan	Rp 7,679,200.00	12	Laporan	Rp 7,679,200.00	12	Laporan	Rp 7,679,200.00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	1	Dokumen	Rp 6,414,900.00	1	Dokumen	Rp 6,414,900.00	1	Dokumen	Rp 6,414,900.00	1	Dokumen	Rp 6,414,900.00	1	Dokumen	Rp 6,414,900.00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	N/A	57	Data	Rp 74,998,400.00	57	Data	Rp 74,998,400.00	57	Data	Rp 74,998,400.00	57	Data	Rp 74,998,400.00	57	Data	Rp 74,998,400.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	N/A	100%		Rp 9,596,060,600.00	100%		Rp 9,596,060,600.00	100%		Rp 9,596,060,600.00	100%		Rp 9,596,060,600.00	100%		Rp 9,596,060,600.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang / Bulan	38	Orang / Bulan	Rp 9,577,523,000.00	38	Orang / Bulan	Rp 9,577,523,000.00	38	Orang / Bulan	Rp 9,577,523,000.00	38	Orang / Bulan	Rp 9,577,523,000.00	38	Orang / Bulan	Rp 9,577,523,000.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif																Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030				
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)		(14)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	Rp 1,014,900.00	1	Dokumen	Rp 1,014,900.00	1	Dokumen	Rp 1,014,900.00	1	Dokumen	Rp 1,014,900.00	1	Dokumen	Rp 1,014,900.00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2	Laporan	Rp 6,205,800.00	2	Laporan	Rp 6,205,800.00	2	Laporan	Rp 6,205,800.00	2	Laporan	Rp 6,205,800.00	2	Laporan	Rp 6,205,800.00		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	5	Laporan	Rp 10,794,800.00	5	Laporan	Rp 10,794,800.00	5	Laporan	Rp 10,794,800.00	5	Laporan	Rp 10,794,800.00	5	Laporan	Rp 10,794,800.00		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	N/A	100%		Rp 44,010,515.00	100%		Rp 44,010,515.00	100%		Rp 44,010,515.00	100%		Rp 44,010,515.00	100%		Rp 44,010,515.00		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif														Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4	Laporan	Rp 522,100.00	4	Laporan	Rp 522,100.00	4	Laporan	Rp 522,100.00	4	Laporan	Rp 522,100.00	4	Laporan	Rp 522,100.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2	Laporan	Rp 42,966,315.00	2	Laporan	Rp 42,966,315.00	2	Laporan	Rp 42,966,315.00	2	Laporan	Rp 42,966,315.00	2	Laporan	Rp 42,966,315.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	N/A	100%		Rp 298,823,900.00	100%		Rp 298,823,900.00	100%		Rp 331,323,900.00	100%		Rp 298,823,900.00	100%		Rp 331,323,900.00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	1	Paket	Rp 32,500,000.00	1	Paket	Rp 32,500,000.00	2	Paket	Rp 65,000,000.00	1	Paket	Rp 32,500,000.00	2	Paket	Rp 65,000,000.00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	3	Dokumen	Rp 74,419,700.00	4	Dokumen	Rp 74,419,700.00	3	Dokumen	Rp 74,419,700.00	4	Dokumen	Rp 74,419,700.00	3	Dokumen	Rp 74,419,700.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	1	Dokumen	Rp 522,100.00	
Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	50 Orang	38	Orang	Rp 190,860,000.00	38	Orang	Rp 190,860,000.00	38	Orang	Rp 190,860,000.00	38	Orang	Rp 190,860,000.00	38	Orang	Rp 190,860,000.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif														Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	100%		Rp 369,127,805.00	100%		Rp 378,532,911.00	100%		Rp 378,532,911.00	100%		Rp 378,532,911.00	100%		Rp 378,532,911.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	Paket	Rp 10,000,000.00	1	Paket	Rp 10,000,000.00	1	Paket	Rp 10,000,000.00	1	Paket	Rp 10,000,000.00	1	Paket	Rp 10,000,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4	Paket	Rp 86,270,500.00	4	Paket	Rp 86,270,500.00	4	Paket	Rp 86,270,500.00	4	Paket	Rp 86,270,500.00	4	Paket	Rp 86,270,500.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	N/A	1	Paket	Rp 16,263,400.00	1	Paket	Rp 18,453,000.00	1	Paket	Rp 18,453,000.00	1	Paket	Rp 18,453,000.00	1	Paket	Rp 18,453,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4	Paket	Rp 10,000,000.00	4	Paket	Rp 10,000,000.00	4	Paket	Rp 10,000,000.00	4	Paket	Rp 10,000,000.00	4	Paket	Rp 10,000,000.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	11 Paket	7	Paket	Rp 23,413,000.00	9	Paket	Rp 25,000,000.00	9	Paket	Rp 25,000,000.00	9	Paket	Rp 25,000,000.00	9	Paket	Rp 25,000,000.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1	Dokumen	Rp 7,800,000.00	1	Dokumen	Rp 7,800,000.00	1	Dokumen	Rp 7,800,000.00	1	Dokumen	Rp 7,800,000.00	1	Dokumen	Rp 7,800,000.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif														Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	Laporan	Rp 10,000,000.00	12	Laporan	Rp 10,000,000.00	12	Laporan	Rp 10,000,000.00	12	Laporan	Rp 10,000,000.00	12	Laporan	Rp 10,000,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	Laporan	Rp 196,281,705.00	12	Laporan	Rp 198,010,211.00	12	Laporan	Rp 198,010,211.00	12	Laporan	Rp 198,010,211.00	12	Laporan	Rp 198,010,211.00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2	Laporan	Rp 9,099,200.00	2	Laporan	Rp 12,999,200.00	2	Laporan	Rp 12,999,200.00	2	Laporan	Rp 12,999,200.00	2	Laporan	Rp 12,999,200.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	N/A	100%		Rp 292,804,400.00	100%		Rp 802,949,900.00	100%		Rp 310,579,200.00	100%		Rp 672,863,700.00	100%		Rp 239,541,900.00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	2	Unit	Rp 289,854,500.00	1	Unit	Rp 800,000,000.00	1	Unit	Rp 36,592,000.00	1	Unit	Rp 36,592,000.00	1	Unit	Rp 36,592,000.00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	50 Unit	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	25	Unit	Rp 200,000,000.00	45	Unit	Rp 365,234,400.00	25	Unit	Rp 200,000,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	1	Unit	Rp 2,949,900.00	1	Unit	Rp 2,949,900.00	1	Unit	Rp 2,949,900.00	1	Unit	Rp 200,000,000.00	1	Unit	Rp 2,949,900.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	1	Unit	Rp 71,037,300.00	1	Unit	Rp 71,037,300.00	0	Unit	Rp -	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif														Ket
			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
			Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	Target		Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%		Rp 2,071,332,780.00	100%		Rp 2,160,936,692.00	100%		Rp 2,160,936,692.00	100%		Rp 2,160,936,692.00	100%		Rp 2,160,936,692.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan	Rp 170,322,000.00	12	Laporan	Rp 170,322,000.00	12	Laporan	Rp 170,322,000.00	12	Laporan	Rp 170,322,000.00	12	Laporan	Rp 170,322,000.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan	Rp 1,901,010,780.00	12	Laporan	Rp 1,990,614,692.00	12	Laporan	Rp 1,990,614,692.00	12	Laporan	Rp 1,990,614,692.00	12	Laporan	Rp 1,990,614,692.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	99.92%	99.10%		Rp 336,018,040.00	99.20%		Rp 277,835,800.00	99.30%		Rp 3,687,706,500.00	99.40%		Rp 357,922,000.00	99.50%		Rp 687,706,500.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17	Unit	Rp 123,120,000.00	17	Unit	Rp 130,240,000.00	17	Unit	Rp 130,240,000.00	17	Unit	Rp 130,240,000.00	17	Unit	Rp 130,240,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	26	Unit	Rp 27,682,000.00	26	Unit	Rp 27,682,000.00	26	Unit	Rp 27,682,000.00	26	Unit	Rp 27,682,000.00	26	Unit	Rp 27,682,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	2	Unit	Rp 185,216,040.00	2	Unit	Rp 119,913,800.00	2	Unit	Rp 3,529,784,500.00	2	Unit	Rp 200,000,000.00	2	Unit	Rp 529,784,500.00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif											
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Dipelihara/Direhabilitasi												
TOTAL ANGGARAN SEKRETARIAT				Rp 13,224,887,940.00		Rp 13,789,748,218.00		Rp 16,739,748,218.00		Rp 13,739,748,218.00		Rp 13,739,748,218.00	
TOTAL ANGGARAN DINAS				Rp 21,501,946,483.00		Rp 19,632,243,918.00		Rp 24,632,243,918.00		Rp 17,632,243,918.00		Rp 17,632,243,918.00	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2025

Ket:

S.1.4 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

S.2.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan

S.2.3 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Menurunnya Tingkat Pengangguran

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai turunan dari program Diskop-UKM sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan program dan sub-kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian outcome pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Produktivitas Usaha Koperasi	Pemberdayaan Usaha yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	PN 3; R 19
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	PN 3; R 19
			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	R 19
			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	R 21
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Wirausaha Baru	Pemberdayaan Usaha yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	R 23
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	PN 3; R 20
			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencetakan Keuangan Usaha mikro dan Usaha Kecil	R 19
			Fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	R 19
			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	R 19
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	R 21
			Pemulihan Usaha Mikro	R 23
			Fasilitasi Sertifikasi dan standarisasi usaha mikro	R 24
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	R 24
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	R 24

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan skala usha menjadi skala kecil	
			Produksi dan Pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	R 19
			Fasilitasi Pengembangan Inkubasi secara Terpadu dan Berjenjang	R 20
			Fasilitasi inkubator usaha mikro	R 20
4	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/ kota	
			Penguatan Tata Kelola kelembagaan Koperasi	R 19
			Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/ kota	R 19
5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten/ kota	
			Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan	R 19
6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	R 19

Sumber : Analisis Diskop UKM, 2025

Ket:

PN 3 = Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Astacita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

R 19 = Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Bupati: Meningkatkan perekonomian daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan berstandar Nasional

R 20 = Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Bupati: Mencetak wirausaha baru dan aktivasi inkubasi bisnis ekonomi kreatif (ekraf)

R 21 = Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Bupati: Peningkatan kerjasama dengan industri dalam rangka pemerataan Pembangunan

R 23 = Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Bupati: Peningkatan Fasilitasi pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan jaminan dan mendorong melalui kerjasama KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada seluruh pelaku usaha termasuk petani

R 23 = Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Bupati: Kemudahan pelayanan perizinan

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung pada periode 2025–2029, diperlukan indikator yang terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. IKU PD tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur kinerja, tetapi juga sebagai alat kendali strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaras dengan visi dan misi daerah.

Penetapan target keberhasilan ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah, potensi ekonomi lokal, serta tantangan global dan regional yang berpengaruh terhadap sektor perdagangan dan industri. Dengan pendekatan berbasis kinerja (performance-based planning), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk mencapai hasil yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3.75-3.84	3.83-3.92	3.98-4.07	4.45-4.56	4.56-4.67	5.03-5.15	Jumlah Usaha Mikro ---------- x 100% Jumlah angkatan kerja
2.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0.32-0.35	0.33-0.36	0.34-0.37	0.34-0.38	0.35-0.39	0.36-0.40	Volume Usaha Koperasi ---------- x 100% PDRB ADHB

Sumber : Analisis Diskop UKM, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung menetapkan target kinerja lima tahunan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur, realistis, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Target ini disusun sebagai bagian integral dari perencanaan strategis tahun 2025 - 2029 dan bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan tercapainya output dan outcome yang diharapkan sesuai dengan kewenangan dinas.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3.75-3.84	3.83-3.92	3.98-4.07	4.45-4.56	4.56-4.67	5.03-5.15	Jumlah Usaha Mikro ---------- x 100% Jumlah angkatan kerja
2.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0.32-0.35	0.33-0.36	0.34-0.37	0.34-0.38	0.35-0.39	0.36-0.40	Volume Usaha Koperasi ---------- x 100% PDRB ADHB

Sumber : Analisis Diskop UKM, 2025

4.5 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029, yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran hingga menetapkan prioritas pembangunan, dan juga menggunakan pendekatan tematik dengan mengusung beberapa tematik pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut juga mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah memperhatikan

orientasi substansi melalui penerapan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Pengusungan Konsep Tematik dimaksudkan sebagai bentuk percepatan pembangunan menuju Visi Kabupaten Bandung 2025 –2029 yang Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan. Sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung, berbagai tematik pembangunan dikonsepkan dengan menggunakan model "Gunungan (Kayon)". Gunungan memiliki makna filosofis dan religius serta merepresentasikan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Gunungan melambangkan penyatuan antara dunia dan akhirat, serta menyiratkan tujuan hidup manusia untuk mencapai kesempurnaan. "Gunungan" juga melambangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalani hidup.

Tematik pembangunan yang dikonsepkan dengan pendekatan konsep "Gunungan" yang berisiran dengan kinerja DISKOP-UKM terdiri dari 2 aksi tematik sebagai berikut:

4.5.1 Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan kemandirian ekonomi. Kabupaten Bandung yang memiliki sumber daya alam melimpah serta keragaman komoditas pangan, memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat regional maupun nasional. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, seperti dampak perubahan iklim, konversi lahan pertanian, ketidakstabilan harga, serta keterbatasan pada sistem distribusi dan infrastruktur pasca panen.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung juga menghadapi permasalahan yang cukup kompleks dalam mendukung sub tema ini. Keterbatasan kapasitas UMKM pangan dalam hal pengolahan, pengemasan, dan standardisasi produk masih menjadi kendala utama. Koperasi sektor pangan belum berfungsi optimal sebagai agregator dan penghubung rantai pasok, sementara akses pasar produk pangan masih terbatas, baik karena kendala distribusi maupun rendahnya pemanfaatan teknologi

digital. Masalah lain yang muncul adalah rendahnya kualitas SDM dalam mengelola usaha pangan, minimnya kemitraan berkelanjutan dengan industri besar maupun jaringan ritel, serta tingginya ketergantungan produk pangan lokal pada pasar daerah tanpa mampu menembus pasar regional dan nasional.

Tujuan yang ingin dicapai melalui dukungan DISKOP UKM adalah meningkatkan daya saing UMKM pangan melalui penguatan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran; mendorong koperasi pangan menjadi aggregator yang efektif dalam rantai pasok pangan danmemperluas akses pasar produk pangan lokal ke tingkat regional dan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa faktor keberhasilan yang harus diperhatikan (*critical success factors*), di antaranya peningkatan kapasitas SDM UMKM dan koperasi yang kompeten dalam pengolahan, manajemen, dan pemasaran; kelembagaan koperasi pangan yang kuat sebagai aggregator dan distributor; pemanfaatan teknologi digital dalam e-commerce dan manajemen rantai pasok; jejaring kemitraan yang luas dengan industri pangan, pusat distribusi, dan ritel modern; serta dukungan regulasi dan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti fasilitas pascapanen, packaging, dan pusat logistik.

Kondisi yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan ini meliputi adanya pendampingan berkelanjutan kepada UMKM dan koperasi pangan, fasilitasi akses permodalan yang mudah dan terjangkau, peningkatan literasi digital, kolaborasi lintas sektor dengan instansi terkait dan pihak swasta, serta penguatan peran koperasi sebagai pusat agregasi dan distribusi pangan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung tematik Peningkatan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung telah menyiapkan berbagai program strategis. Dukungan diarahkan pada penguatan rantai nilai produk pangan melalui pengembangan UMKM dan koperasi. Upaya ini dimulai dengan penumbuhan unit-unit pengolahan dan pengemasan hasil produk pangan, disertai peningkatan kualitas produk agar lebih berdaya saing. Program yang dijalankan mencakup pelatihan pengolahan pangan dan

kemasan modern, fasilitasi sertifikasi produk, serta pendampingan dalam pemanfaatan teknologi pemasaran digital. DISKOP-UKM juga mendorong terbentuknya jejaring kemitraan yang berkelanjutan melalui fasilitasi jejaring usaha, pendampingan pola kemitraan dengan pelaku industri maupun jaringan ritel, serta pemberdayaan UMKM agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional.

Di sisi kelembagaan, penguatan peran koperasi produsen dan koperasi sektor pangan menjadi prioritas dengan memberikan pendampingan tematik perkoperasian, pelatihan pelaksanaan dan pelaporan RAT, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi. Hal ini bertujuan agar koperasi mampu menjalankan fungsi intermediasi, agregasi, dan distribusi produk pangan dengan tata kelola yang lebih baik. Melalui program pengembangan UMKM pangan, penguatan koperasi pangan, fasilitasi jejaring usaha, pemberdayaan akses permodalan dan teknologi, hingga inkubasi usaha pangan berbasis inovasi, DISKOP-UKM berperan penting dalam membangun ekosistem usaha pangan yang saling terhubung.

Dengan berbagai dukungan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Dukungan ini tidak hanya memperkuat kualitas dan daya saing produk pangan, tetapi juga menciptakan kemandirian pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berdaya saing.

4.5.2 Kawasan Ekonomi Terpadu

Pengembangan perekonomian Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Bandung tahun 2025–2029 diwujudkan melalui pendekatan klaster ekonomi. Klaster adalah sekelompok perusahaan dan lembaga terkait yang saling terhubung secara geografis dan berdekatan dalam suatu bidang tertentu, yang terhubung oleh kesamaan dan saling melengkapi (Porter, 1998, 2000). Konsentrasi ini mendorong lingkungan unik yang menggerakkan inovasi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif (Cortright, 2006). Dengan demikian, pengembangan Kawasan

Ekonomi Terpadu (KET) di Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

Meski demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dalam mewujudkan Kawasan Ekonomi Terpadu. Permasalahan tersebut antara lain masih terbatasnya kualitas produk UMKM yang belum memenuhi standar industri (kemasan, sertifikasi, dan standardisasi produk), rendahnya kemampuan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, serta lemahnya jejaring kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, koridor industri, maupun pasar modern. Selain itu, kelembagaan koperasi belum sepenuhnya berperan optimal sebagai agregator produk anggota, ditambah masih terbatasnya tata kelola koperasi yang profesional dan transparan. Rendahnya kapasitas SDM UMKM dan koperasi dalam manajemen usaha juga menjadi tantangan dalam membangun kawasan ekonomi terpadu yang solid dan berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui dukungan DISKOP-UKM terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran; mendorong lahirnya wirausaha baru yang inovatif dan berorientasi pasar; memperkuat peran koperasi sebagai agregator produk lokal dan pusat layanan ekonomi anggota; serta menciptakan ekosistem usaha yang terintegrasi dan saling melengkapi antara UMKM, koperasi, industri besar, dan jejaring ritel modern. Dengan demikian, Kawasan Ekonomi Terpadu mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) yang harus dipenuhi. Pertama, adanya peningkatan kualitas SDM UMKM dan koperasi melalui pelatihan manajemen usaha, inovasi produk, dan literasi digital. Kedua, penguatan kelembagaan koperasi agar mampu menjalankan fungsi intermediasi, agregasi, dan distribusi

produk secara profesional. Ketiga, tersedianya dukungan infrastruktur ekonomi, seperti pusat layanan usaha, sarana inkubasi, dan fasilitas logistik yang terintegrasi. Keempat, keberlanjutan jejaring kemitraan dengan industri besar, ritel modern, serta koridor industri strategis. Kelima, adanya dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak pada pengembangan UMKM dan koperasi.

Kondisi yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi terpadu antara lain pendampingan intensif dan berkelanjutan kepada UMKM dan koperasi, fasilitasi akses permodalan yang inklusif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan instansi terkait, dunia usaha, dan akademisi guna memperkuat sinergi dalam membangun klaster ekonomi daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung memberikan dukungan strategis melalui berbagai program. Dukungan bagi UMKM diarahkan pada peningkatan kualitas produk melalui perbaikan kemasan, standardisasi, dan sertifikasi, sehingga mampu memenuhi selera pasar serta standar industri yang lebih luas. DISKOP UKM juga memfasilitasi pemasaran digital melalui pelatihan *e-commerce*, optimalisasi media online, serta pengembangan jejaring kemitraan dengan usaha besar dan koridor industri. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM UMKM menjadi perhatian melalui pelatihan manajemen usaha, inkubasi produk unggulan, dan pendampingan intensif untuk melahirkan wirausaha baru yang tangguh dan inovatif.

Dalam sisi kelembagaan koperasi, dukungan diberikan melalui pendampingan tematik perkoperasian, pelatihan pelaksanaan dan pelaporan RAT, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar koperasi mampu berfungsi sebagai agregator produk dan pusat layanan ekonomi anggota. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tata kelola koperasi berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan berbagai dukungan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung berkomitmen

untuk menjadikan Kawasan Ekonomi Terpadu sebagai wadah tumbuhnya UMKM dan koperasi yang berdaya saing tinggi, mampu menciptakan nilai tambah produk lokal, serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pengembangan koperasi dan UMKM. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029.

Renstra ini mengedepankan dua indikator kunci sebagai arah strategis pembangunan daerah, yaitu Rasio Kewirausahaan Daerah dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB. Kedua indikator tersebut dipandang krusial untuk mendorong peningkatan daya saing produk unggulan, menciptakan perluasan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi kerakyatan berbasis kelembagaan koperasi dan UMKM. Dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung menetapkan tahapan pembangunan lima tahunan yang disusun secara bertahap dan tematik. Setiap tahapan dirancang untuk saling melengkapi dan memperkuat, dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, kemampuan sumber daya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan Renstra ini juga didukung oleh pendekatan lokus wilayah berbasis data sebaran koperasi dan usaha mikro, sehingga intervensi program lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan kewilayahan. Diharapkan, dengan pelaksanaan Renstra ini, kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung semakin terarah dan mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha koperasi dan mikro. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi Renstra ini.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renstra Diskop UKM tahun 2025-2029, terdapat beberapa kaidah atau pedoman yang harus dijadikan acuan oleh seluruh

pemangku kepentingan. Pertama, pelaksanaan program dan kegiatan harus mengutamakan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berkeadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimanfaatkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kedua, pelaksanaan Renstra harus dilakukan secara sinergis dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah lainnya, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Koordinasi yang efektif antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dengan pihak swasta dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra.

Ketiga, pelaksanaan Renstra harus mengedepankan pendekatan kemitraan dan pemberdayaan, di mana Diskop UKM berperan sebagai fasilitator dan katalisator, bukan pelaku utama. Pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan UKM, harus dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan mereka dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Keempat, dalam pelaksanaan Renstra, perlu memperhatikan aspek keberlanjutan *(sustainability)* baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Setiap program dan kegiatan yang dirancang harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketiga aspek tersebut.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Untuk memastikan Renstra Diskop UKM tahun 2025-2029 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Pengendalian akan dilakukan secara berkala melalui monitoring dan review kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian meliputi pelaporan berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran) yang disusun oleh setiap unit kerja, kemudian diverifikasi dan dianalisis oleh tim monitoring internal Diskop UKM. Hasil monitoring akan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian atau koreksi jika ditemukan penyimpangan dari rencana awal.

Evaluasi akan dilakukan pada tingkat output, outcome, dan dampak. Evaluasi tingkat output bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil-hasil langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi tingkat *outcome*

bertujuan untuk mengukur perubahan yang terjadi akibat output yang dihasilkan, sedangkan evaluasi tingkat dampak bertujuan untuk mengukur kontribusi Renstra terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor koperasi dan UKM secara keseluruhan. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun (evaluasi tahunan) dan di akhir periode Renstra (evaluasi akhir). Hasil evaluasi akan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan pelaksanaan Renstra yang sedang berjalan dan menjadi masukan bagi penyusunan Renstra periode berikutnya. Selain itu, hasil evaluasi juga akan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan pembangunan.

Soreang, September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Ttd

DINDIN SYAHIDIN

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Diskop-UKM 21
Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Diskop-UKM 22
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskop UKM 35
Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Diskop UKM 2021-2026 39
Tabel 2.5 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 98
Tabel 2.6 Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029 105
Tabel 2.7 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung 107
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 108
Tabel 2.9 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah 113
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Diskop-UKM 115
Tabel 3.2 Strategi Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung 116
Tabel 3.3 Penahapan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 119
Tabel 3.4 Penyajian Lokus PD 127
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 129
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Dinas Koperasi dan UKM 132
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan 150
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 166
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM 168
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan PD.....11
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Diskop-UKM Kab. Bandung 18
Gambar 2.2 Perkembangan jumlah Koperasi Tahun 2021–2024 23
Gambar 2.3 Peta Sebaran Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2024 24
Gambar 2.4 Perkembangan Volume Usaha dan SHU Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021–2024 25
Gambar 2.5 Pertumbuhan Anggota Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2021–2024 26
Gambar 2.6 Peta Sebaran Koperasi Berkualitas di Kabupaten Bandung Tahun 2024.....27
Gambar 2.7 Peta Sebaran Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan di Kabupaten Bandung Tahun 2024.....28
Gambar 2.8 Peta Sebaran Kantor Cabang Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2024.....29
Gambar 2.9 Peta Sebaran Koperasi yang melaksanakan RAT di Kabupaten Bandung Tahun 2024 29
Gambar 2.10 Perkembangan jumlah Usaha Mikro Tahun 2022–2024.....31
Gambar 2.11 Peta Sebaran UMKM di Kabupaten Bandung Tahun 2024 32
Gambar 2.12 Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Tahun 2021–2024.....33
Gambar 2.13 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Renstra Diskop-UKM.....38
Gambar 2.14 Isu Sasaran 3 RPJMN 2025 – 2029 97
Gambar 3.1 Pentahapan Pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 117